

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PELIBATAN TNI DALAM Mendukung PROGRAM
VAKSINASI GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :
ENDRO SATOTO
NO. URUT 24

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA LXII)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wbr. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI PELIBATAN TNI DALAM MENDUKUNG PROGRAM VAKSINASI GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL”**

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Marsda TNI Agus Radar Suchyo dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

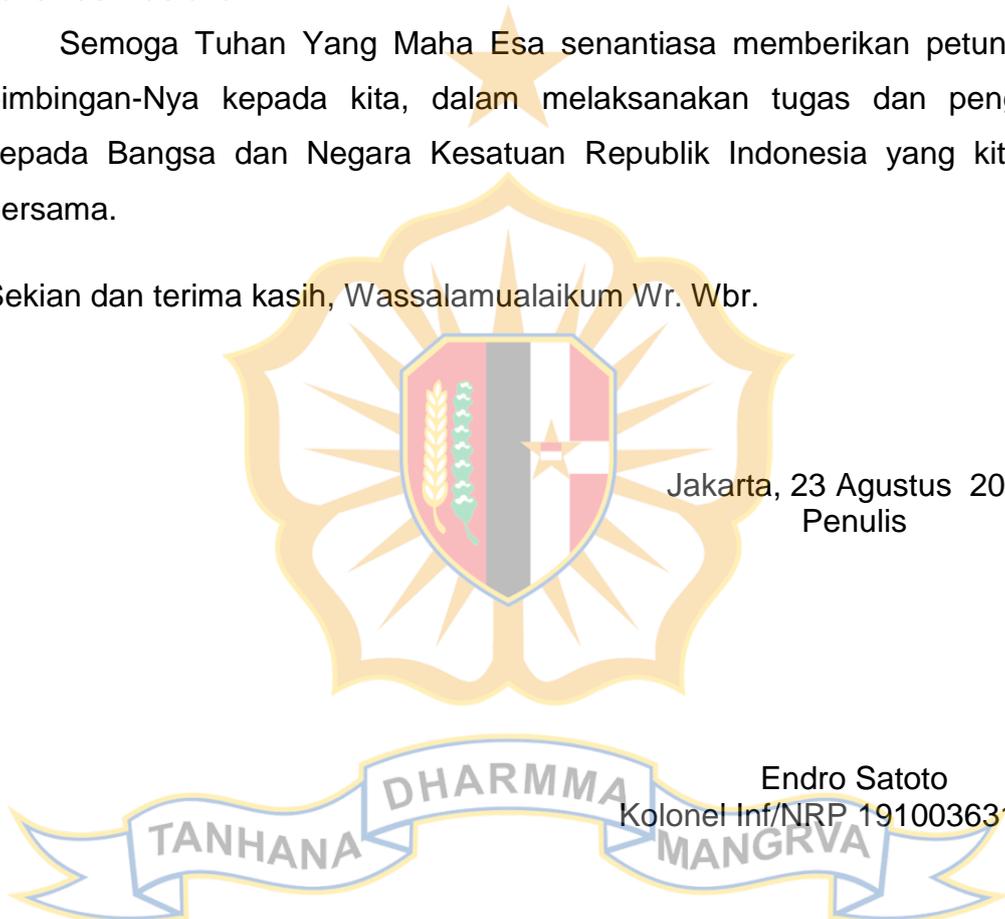
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini penulis akui masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan

naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI serta pihak-pihak terkait yang membutuhkannya dalam upaya mendukung percepatan program vaksinasi nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wbr.



Jakarta, 23 Agustus 2021
Penulis

Endro Satoto
Kolonel Inf/NRP 1910036310669

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endro Satoto, SIP., MM., M.Han.
Pangkat/NRP : Kolonel Infanteri/1910036310669
Jabatan : Pamen Mabasad.
Instansi : TNI AD
Alamat : Jl. Veteran No. 5. Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.



Endro Satoto,
Kolonel Inf/NRP 1910036310669

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	11
9. Kerangka Teoritik	15
10. Data dan Fakta	17
11. Perkembangan Lingkungan Strategis	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	26
13. Urgensi Vaksin melalui Program Vaksinasi Nasional...	26
14. Kekuatan dan Kemampuan TNI dalam Mendukung Program Vaksinasi Nasional.....	33
15. Pelibatan TNI dalam mendukung program Vaksinasi guna mewujudkan ketahanan nasional	40

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	49
17. Rekomendasi	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. KELENGKAPAN DATA
3. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 KETERSEDIAAN VAKSIN PER 20 AGUSTUS 2021

TABEL 4.2 DATA BABINSA FEBRUARI 2021

TABEL 4.3 PERBANTUAN TNI SESUAI DENGAN KAPABILITASNYA
DALAM PENANGANAN COVID-19



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 4.1 PERKEMBANGAN KASUS KONFIRMASI HARIAN & KASUS AKTIF COVID-19
- GAMBAR 4.2 PERBANDINGAN VAKSINASI DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN
- GAMBAR 4.3 PENTAHAPAN KELOMPOK PRIORITAS PENERIMA VAKSINASI
- GAMBAR 4.4 RUMAH SAKIT TNI DAN POLRI MEMBANTU PENANGANAN COVID-19



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

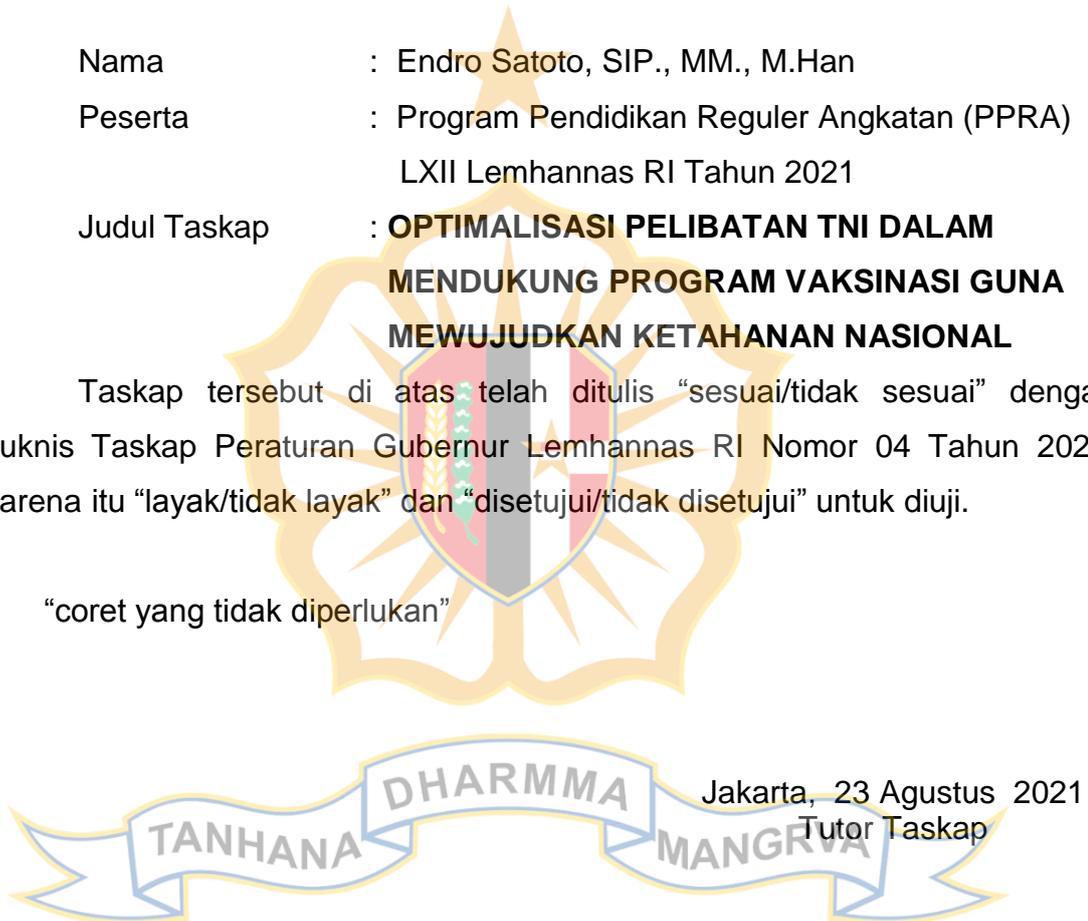
Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Endro Satoto, SIP., MM., M.Han
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
LXII Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : **OPTIMALISASI PELIBATAN TNI DALAM
MENDUKUNG PROGRAM VAKSINASI GUNA
MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan
Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021,
karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, 23 Agustus 2021
Tutor Taskap



Agus Radar Sucahyo
Marsda TNI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah menyampaikan bahwa *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) merupakan pandemi global karena telah tersebar hampir disebagian besar negara-negara di dunia. Selain itu WHO juga menegaskan bahwa Covid-19 akan berlangsung cukup lama sehingga dapat menimbulkan kelelahan dalam menghadapi masalah tersebut terlebih jumlah kasus terkonfirmasi positif terus bertambah tiap waktunya.¹ Situasi semakin sulit karena telah ditemukannya varian baru Covid-19 dari Inggris, Afrika Selatan, dan India yang dinilai lebih menular dan berpotensi meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyebaran virus tersebut.

Penyebaran virus yang masih terus terjadi telah menimbulkan berbagai dampak sistemik bagi kehidupan manusia diantaranya berkaitan dengan ketahanan pangan. Berdasarkan laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Food Programme* (WFP) mencatat terdapat 27 Negara dibayangi Krisis Pangan karena pandemi Covid-19 yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan, belum baiknya penanganan pandemi pada sektor pangan dunia, pendapatan pemerintah yang menurun serta instabilitas politik sehingga dapat memicu konflik sumber daya alam SDA.² Merespon kondisi tersebut maka perlu dibangun ketahanan pangan seperti *Food Estate* yang dilakukan di Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dimana pemerintah mencanangkan 110.000 ha mampu tergarap dengan baik hingga tahun 2023.³ Program ini pada dasarnya merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan sehingga mampu menjaga ketahanan pangan secara nasional. Beberapa

¹ <https://id.berita.yahoo.com/memperingatkan-bahwa-pandemi-corona-dapat-123035424.html>, diakses 20 Mei 2021 pukul 16.23 WIB.

² Reni Lestari dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/19/1268360/fao-27-negara-dibayangi-krisis-pangan-gara-gara-pandemi-covid-19>, diakses 19 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

³ <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbang-baru-di-kalimantan-tengah>, diakses 22 Juni 2021 pukul 16:30 WIB.

daerah juga turut melaksanakan program tersebut seperti Sumatera Selatan dan Papua.

Disamping itu salah satu aspek lain yang cukup terdampak dari penyebaran Covid-19 yaitu bidang ekonomi. Laporan *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kelambatan atau tumbuh negatif 4,9 persen di tahun 2020.⁴ Angka ini lebih rendah 1,9 poin dibanding pada bulan April sebelumnya yang diperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global berkontraksi 3 persen. Akibat dari kontraksi tersebut berimbas pada 10 negara jatuh resesi akibat pandemi seperti: AS, Jerman, Prancis, Italia, Korsel, Jepang, Hongkong, Singapura, Filipina dan Inggris.⁵ Adapun bagi Indonesia, pandemi Covid-19 juga telah memberikan pengaruh besar bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat terlihat dari terganggunya ekspor dan impor, aktivitas ekonomi mikro (UMKM) melemah, pengangguran, daya beli menurun dan investasi melemah.⁶ Menghadapi masalah tersebut, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis yang tertuang pada 9 kebijakan ekonomi mulai dari pemberian keringanan atas cicilan hingga penundaan pajak.⁷

Selain itu sektor lain yang cukup terdampak akibat pandemi Covid-19 dapat terlihat pada bidang kesehatan. Saat ini pandemi Covid-19 sedang menguji ketahanan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Setidaknya pandemi ini akan menghantam sistem pelayanan kesehatan Indonesia dalam empat gelombang besar.⁸ Gelombang kesakitan dan kematian akibat Covid-19 adalah gelombang pertama. Di Indonesia, gelombang ini dimulai pada awal Maret dengan temuan dua kasus positif. Hingga 13 Juli 2020 kasus telah tumbuh menjadi 76.981 kasus dengan 3.656 kasus kematian. Gelombang pertama ini diperkirakan masih akan menghantam

⁴ Mutia Fauzia dalam <https://money.kompas.com/read/2020/06/25/054100526/dampak-corona-lebih-parah-imf-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-4-9-persen>, diakses 21 Juni 2021 pukul 20:00 WIB.

⁵ Fika Nurul Ulya dalam <https://money.kompas.com/read/2020/08/13/133706626/ini-10-negara-jatuh-resesi-akibat-pandemi-bagaimana-dengan-indonesia>, diakses 21 Juni 2021 pukul 20:00 WIB.

⁶ Nidia Zuraya dalam <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>, diakses 14 April 2021 pukul 10.44 WIB.

⁷ Ihsanuddin dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=3>, diakses 19 Juni 2021 pukul 15:21 WIB.

⁸ <https://nationalgeographic.grid.id/read/132255604/dampak-pandemi-covid-19-hantam-sistem-pelayanan-kesehatan-dalam-4-gelombang?page=3>, diakses 19 Agustus 2021 pukul 15:32 WIB.

sistem pelayanan kesehatan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih adanya temuan studi terbaru yang menyatakan bahwa seseorang “berpotensi” untuk dapat tertular virus corona berkali-kali. Gelombang kedua adalah krisis keuangan rumah sakit. Bermula pada April, ketika Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar rumah sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Pada saat yang sama masyarakat juga membatasi kunjungan ke rumah sakit karena takut tertular Covid-19. Kebijakan dan fenomena ini mengakibatkan penurunan signifikan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit dan akibatnya pendapatan rumah sakit anjlok.

Gelombang selanjutnya adalah peningkatan angka infeksi, stres, dan kelelahan tenaga kesehatan. Di Indonesia hasil penelitian menunjukkan sekitar 66% responden dari 644 tenaga kesehatan mengalami kecemasan, 55% stres dan 23,5% depresi akibat Covid-19. Gelombang ini diperkirakan akan menghantam pelayanan kesehatan dengan durasi waktu terlalu lama dibandingkan gelombang lainnya. Peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis adalah gelombang keempat. Berbeda dengan tiga gelombang sebelumnya yang mulai dirasakan, gelombang keempat mungkin belum terlalu dirasakan hantamannya. Gelombang ini terjadi karena selama masa pandemi, terjadi fenomena penundaan mencari perawatan yang dilakukan oleh para penderita penyakit kronis seperti kanker, jantung, gagal ginjal dan stroke. Dalam jangka panjang, penundaan perawatan tersebut bisa berdampak serius karena memparah sakitnya.

Adapun fluktuasi kasus positif yang masih terjadi merupakan fenomena yang perlu diwaspadai karena memiliki dampak sistemik bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Data per 17 Agustus 2021 tercatat 3.803.479 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan penambahan kasus per hari melonjak hingga 20.741 kasus.⁹ Jumlah ini memang telah terjadi penurunan karena sebelumnya kasus harian positif Covid-19 pada 14 Juli 2021 pernah menyentuh angka 54.517 kasus.¹⁰

⁹ Aditya Budiman dalam <https://nasional.tempo.co/read/1495756/data-covid-19-per-17-agustus-2021-mencekam-dibandingkan-tahun-lalu/full&view=ok>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 09:01 WIB.

¹⁰ Atalya Puspa dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/418535/penambahan-kasus-covid-19-harian-indonesia-tembus-50-ribu-kasus>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 21:31 WIB.

Melihat kondisi yang demikian, pemerintah pun terus melakukan berbagai upaya seperti pentingnya perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), penegakkan 5M yang diperkuat dengan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang masih berlaku saat ini dimana terdapat pengetatan kegiatan masyarakat pada sektor-sektor tertentu didasarkan pada zona risiko Covid-19 di daerah masing-masing. Disamping untuk menekan penyebaran virus Covid-19, pemerintah juga mengambil kebijakan dengan menerapkan 3T yaitu *tracking*, *tracing*, dan *treatment*. Upaya ini sebagai bagian agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Sebagai respon atas dampak pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa, pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 telah menjadi bencana nasional non alam-luar biasa (*extra ordinary*) yang didasarkan pada UU No. 24 tahun 2007.¹¹ Dalam menghadapi bencana tersebut pemerintah mengambil kebijakan strategis dengan membentuk Komite khusus penanganan Covid-19. Komite ini merupakan wujud dalam penanganan Covid-19 dengan melibatkan berbagai K/L terkait tak terkecuali TNI-Polri. Keterlibatan TNI-Polri terlihat dari ditunjuknya KASAD sebagai Wakil Ketua Pelaksana dan Wakapolri sebagai Wakil Ketua Pelaksana II dengan harapan mampu memberikan dampak positif khususnya dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.

Disamping itu dalam menekan penyebaran Covid-19, Presiden sebagai kepala negara mengambil langkah untuk melakukan vaksinasi nasional, dimana sebanyak 182 juta masyarakat diharapkan sudah tervaksinasi kurang dari 1 tahun yang dilaksanakan secara kluster.¹² Adapun dalam pelaksanaannya, vaksinasi yang digagas pemerintah dilakukan secara bertahap dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan per 3 Agustus 2021 telah dilakukan vaksinasi sebanyak 21 jutaan

¹¹ Risna Halidi dalam <https://www.suara.com/health/2020/03/17/210741/ini-alasan-mengapa-wabah-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional>, diakses 25 Juni 2021 pukul 19:01 WIB.

¹² <https://kabar24.bisnis.com/read/20210211/15/1355207/jokowi-perintahkan-vaksinasi-Covid-19-dilaksanakan-secara-klaster> dan <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemerintah-targetkan-vaksinasi-nasional-rampung-akhir-tahun/ar-BB1eoz2z> diakses 11 Februari 2021 pukul 13.21 WIB.

orang telah tervaksin secara lengkap.¹³ Jika mengacu pada target vaksinasi nasional tentu perlu upaya keras dalam mewujudkannya terlebih kondisi geografis serta sumber daya yang dimiliki menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya program tersebut. Oleh karena itu dalam upaya mempercepat proses vaksinasi, Presiden menginstruksikan kepada seluruh K/L terkait lainnya termasuk perbantuan TNI dimana Kemenkes sebagai *leading sector* agar terlibat aktif dalam mensukseskan program tersebut.

Pelibatan TNI dalam penanganan covid-19 dijelaskan pada UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan tentang Tugas Pokok TNI melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam konteks ini dengan pelibatan TNI terkait dengan pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksin. Namun demikian yang perlu dipahami pada konteks pengadaan pada dasarnya merupakan domain pemerintah sehingga TNI lebih memiliki kapasitas dalam hal pendistribusian dan pelaksanaan vaksin dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki.

Kekuatan TNI dalam konteks ini berhubungan dengan ketersediaan personel serta sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki TNI seperti rumah sakit permanen ataupun rumah sakit lapangan, alat transportasi darat, laut dan udara sangat membantu dalam penanganan Covid-19. Pengerahan kekuatan TNI tersebut menjadi sangat diperlukan ditengah penanganan Covid-19 yang membutuhkan upaya cepat dan tepat. Adapun kemampuan TNI tidak hanya berkaitan dalam konteks militer atau berperang tetapi juga dibidang kesehatan dan pelayanan. Pengerahan tenaga kesehatan baik dokter, perawat dan para Babinsa serta unsur pelayanan dari perbekalan angkutan untuk membuka dapur lapangan, merupakan kemampuan yang dimiliki TNI untuk membantu mempercepat penanganan Covid-19. Terlebih dengan kondisi geografi Indonesia yang kompleks dimana TNI dipandang mempunyai mobilitas yang baik khususnya untuk menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar.

Namun demikian dalam prakteknya distribusi dan pelaksanaan vaksin yang dilakukan masih menghadapi berbagai persoalan, distribusi vaksin yang

¹³ <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/05/337/2451568/21-juta-penduduk-indonesia-sudah-divaksin-covid-19-secara-lengkap>, diakses 17 Agustus 2021 pukul 17:12 WIB.

masih terkendala karena luasnya wilayah Indonesia terlebih masyarakat yang berada di daerah terpencil. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya kotak pendingin yang dimiliki dan SDM dalam melakukan vaksinasi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan vaksinasi nasional. Selain itu dari sisi pelaksanaan vaksin, TNI masih terkendala khususnya masih adanya masyarakat yang menolak vaksin sehingga mengganggu tercapainya *herd immunity* (kekebalan kelompok). Ditambah lagi terbatasnya tenaga medis yang dimiliki TNI yang mendukung vaksinasi nasional menjadikan pencapaian target belum dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu mendapatkan perhatian serius sehingga pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi nasional dapat dioptimalkan, tepat sasaran dan pada akhirnya mampu mewujudkan ketahanan nasional. Hal ini perlu dipahami target vaksinasi nasional pada dasarnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk TNI sehingga pelibatannya perlu dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Rumusan Masalah

Dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, melalui vaksinasi nasional maka perlu melibatkan pihak-pihak terkait termasuk TNI atas kekuatan dan kemampuan yang dapat diandalkan untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mengacu pada hal tersebut maka rumusan masalah utama yaitu: “bagaimana optimalisasi pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi guna mewujudkan ketahanan nasional”. Adapun beberapa pertanyaan-pertanyaan kajian yang diajukan, diantaranya berkaitan dengan:

1. Apa urgensi vaksin melalui program vaksinasi nasional?
2. Bagaimana kekuatan dan kemampuan TNI dalam mendukung program vaksinasi nasional?
3. Bagaimana pelibatan TNI (kekuatan dan kemampuan) dalam mendukung vaksinasi guna mewujudkan ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud. Penulisan Kertas Karya Perorangan ini yaitu untuk memberikan gambaran berbagai permasalahan mengoptimalkan pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi, sinergi pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta ketahanan nasional. Penulisan ini juga dimaksudkan melihat sejauhmana pengaruh lingkungan strategis (peluang dan kendala), sehingga dapat dirumuskan kebijakan, strategi, dan program.
- b. Tujuan. Penulisan Taskap ini bertujuan sebagai sumbangan pemikiran penulis secara konseptual dan strategis berupa masukan kepada pihak-pihak terkait terutama bagi penentu kebijakan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

- a. Ruang Lingkup. Penulisan taskap ini memiliki ruang lingkup yang difokuskan pada distribusi dan pelaksanaan vaksin dengan melibatkan TNI dalam mendukung program vaksinasi sehingga mampu mewujudkan ketahanan nasional sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang menjadi urgensi dalam penulisan ini.
- b. Sistematika Penulisan. Mengacu pada Juknis Taskap Lemhannas tahun 2021 maka sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan permasalahan terkait persoalan-persoalan yang dihadapi perihal penanganan Covid-19 saat ini khususnya pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi. Selanjutnya dijelaskan sedikit perlunya mengoptimalkan pelibatan TNI dengan langkah-langkah strategis sehingga mampu mewujudkan ketahanan nasional. Adapun dalam bab ini juga dijelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan konteks penelitian ini.
 - 2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran penulis, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, yaitu: Peraturan Perundang-undangan,

kerangka teoritis, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan analisis tulisan ini.

- 3) Bab III Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang meliputi gambaran urgensi vaksin, pelibatan kekuatan dan kemampuan TNI dalam mendukung program vaksinasi sehingga mampu mewujudkan ketahanan nasional.
- 4) Bab IV Penutup. Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi penulis terhadap kebijakan strategis mengenai variabel-variabel pembahasan.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. Metode. Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dalam metode didasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.
- b. Pendekatan. Taskap ini menggunakan pendekatan yang dilakukan secara komprehensif, holistik dan integral, dengan menggunakan perspektif Ketahanan Nasional.

6. Pengertian.

- a. **Optimalisasi.** Proses dalam menjadikan sesuatu memiliki nilai tinggi karena telah terjadi peningkatan yang lebih baik.¹⁴
- b. **OMSP.** Bentuk operasi yang dilakukan TNI diluar operasi militer dimana dalam operasi tersebut terdapat 14 bentuk yang pada intinya mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara.¹⁵
- c. **Vaksinasi.** Pencegahan primer yang bertujuan untuk meminimalisir terjangkitnya penyakit menular dengan memberikan kekebalan pada imunitas tubuh.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

¹⁵ *Ibid.*

- d. **Ketahanan Nasional.** Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional terhadap berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada.¹⁷
- e. **Integrasi.** Pembauran atau penyatuan dari unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh.¹⁸



¹⁶ M. Albertina, S. Febrina, W. Firmada, Y. Permata, & Gunardi, 2009. Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di Poliklinik Anak Beberapa Rumah Sakit di Jakarta dan Sekitarnya pada Bulan Maret 2008. *Sari Pediatri*, 11(1), pp. 1-7.

¹⁷ Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2021. *Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhanas RI.

¹⁸ Soejono Soekanto. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 157-158.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi nyatanya telah memberikan dampak sistemik bagi kehidupan manusia. Penyebarannya yang sangat massif hingga menjangkit hampir seluruh negara di dunia membuktikan pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Sifatnya yang menular melalui udara dengan cepat dan menimbulkan dampak luar biasa bagi yang terpapar menandakan virus Covid-19 perlu penanganan khusus agar mampu dikendalikan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan vaksinasi secara nasional. Hal ini perlu dipahami karena sampai saat ini belum ada obat yang mampu menyembuhkan atas virus tersebut. Oleh karena itu sebagian besar negara sepakat salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan vaksinasi secara nasional.

Untuk dapat mendukung program vaksinasi nasional tersebut maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk TNI agar mampu mempercepat penanganan Covid-19. Pelibatan TNI sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berkaitan dengan kemampuan dan kekuatan TNI dalam mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi secara nasional khususnya berkenaan dengan pendistribusian dan pelaksanaan vaksin. Hal ini perlu dipahami karena program vaksinasi merupakan langkah menekan penyebaran virus Covid-19 sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak terutama TNI.

Dalam mendukung upaya tersebut maka pada bagian ini diperlukan peraturan perundang-undangan, teori, data fakta dan perkembangan lingkungan strategis (global, regional dan nasional). Hal ini diperlukan agar dapat lebih memahami dan membantu dalam proses analisis sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang dibahas khususnya berkenaan dengan optimalisasi pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi guna mewujudkan ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. Perundang-undangan

1) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun Pertahanan Negara 2002 pasal 1 ayat 1 tentang dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut pasal 10 dijelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksa¹⁰ kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Konsekuensi sebagai alat pertahanan negara adalah TNI berkedudukan di bawah Presiden sebagai kepala negara. Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa TNI mengemban tugas yang sangat kompleks termasuk dalam penanganan bencana non alam (Covid-19). Unsur TNI menjadi sangat diperlukan khususnya dalam mempercepat penanganan Covid-19 mengingat kondisi wilayah Indonesia yang sangat kompleks.

2) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, dan melindungi segenap bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan.¹⁹ TNI melaksanakan tugasnya melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan OMSP. Hal ini menunjukkan bahwa TNI mengemban tugas

¹⁹ Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7.

yang sangat kompleks karena tidak hanya terkait dengan persoalan militer namun juga berkenaan dengan non-militer sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat 2. Adapun dalam konteks ini keterlibatan TNI dapat dilihat pada perbantuan terkait dengan mendukung program vaksinasi yang digagas pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. Kemampuan TNI dipandang mampu untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan tercapainya program vaksinasi secara nasional.

3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu tujuan penanggulangan bencana yaitu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.²⁰ Artinya regulasi ini menjadi rujukan dalam menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Adapun pasal 50 menjelaskan dalam keadaan status darurat bencana maka BNPB memiliki kemudahan akses termasuk komando untuk memerintahkan sektor/lembaga termasuk TNI untuk terlibat aktif pada penanganan bencana khususnya menghadapi Covid-19. Langkah ini bertujuan agar dapat mempercepat penanganan Covid-19 sehingga masyarakat dapat menata kehidupan sebagaimana mestinya.

4) Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 1 ayat 1 keekarantinaan kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika melihat ketentuan yang ada karantina kesehatan terdiri dari berbagai bentuk yaitu: isolasi, karantina rumah, karantina rumah

²⁰ Lihat UU No. 24 Tahun 2007 pasal 4 poin b.

sakit, karantina wilayah, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun dalam konteks ini menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia menerapkan PSBB dimana pada pasal 1 ayat 11 dijelaskan PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk disuatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi untuk mencegah penyebarannya. Langkah ini merupakan bagian dari kekarantinaan kesehatan dimana masyarakat masih dapat menjalankan aktivitasnya namun secara terbatas dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga diharapkan mampu menekan penyebaran virus tersebut.

b. Peraturan-peraturan terkait

1) Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Regulasi ini berusaha mengatur serta menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Di dalam Inpres ini dijelaskan K/L yang terlibat untuk dapat berperan aktif dalam peningkatan protokol kesehatan (prokes) dalam upaya menekan penyebaran virus tersebut. Prokes menjadi hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh masyarakat agar penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang

dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip hidup bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah Covid-19 dapat segera berakhir.

Terkait dengan hal tersebut maka regulasi ini merupakan acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi Covid-19.

3) Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/459/VI/2020 tentang Naskah Sementara Petunjuk Referensi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan TNI.

Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI) mempunyai tugas salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan integratif melalui upaya kesehatan promotif preventif dan upaya kesehatan kuratif rehabilitatif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Puskes TNI mempunyai fungsi utama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan integratif kepada personel TNI dan keluarganya melalui upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan penyakit. Agar dalam

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi yang berpotensi wabah khususnya *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) pada satuan kerja dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku, serta menyamakan pola pikir dan pola tindak maka perlu disusun Naskah Sementara Petunjuk Referensi (Jukref) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Lingkungan TNI. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesatuan dan keterpaduan serta kesamaan berpikir dan bertindak dari semua unsur pelaksana yang terlibat, sehingga pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada satuan kerja dapat berjalan secara lancar, aman, tertib administrasi, dan akuntabel. Adapun dalam kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 berpedoman pada prinsip kesatuan komando, kecepatan dan ketepatan dan prioritas. Dengan demikian penanganan Covid-19 dapat lebih terencana dan terukur pencapaiannya.

9. Kerangka Teoretik

a. Tinjauan Teori

1) Optimalisasi.

Winardi, menjelaskan optimalisasi sebagai upaya dalam pencarian nilai terbaik dari opsi atau kemungkinan yang tersedia dalam suatu konteks. Optimalisasi juga dapat diterjemahkan sebagai proses/usaha mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan suatu solusi dalam rangka memilih solusi yang terbaik dari sekumpulan pilihan-pilihan solusi yang tersedia. Proses optimalisasi, memerlukan pemaksimalan atau meminimasi suatu fungsi objektif tanpa melanggar batasan yang ada. Optimalisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas suatu sistem, seperti mengurangi biaya dan waktu proses, meningkatkan keuntungan, dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini, teori optimalisasi digunakan untuk menemukan aspek-aspek OMSP TNI dan komando lembaga yang terlibat yang perlu dan masih dapat ditingkatkan keefektifan

²¹ Sudaryantho Dannyanti, Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP), Disertasi, Universitas Diponegoro.

dan keefisienannya khususnya dalam keterlibatannya di dalam penanganan Covid-19.

2) Kebijakan.

Kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam salah satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan²². Definisi Dunn tentang istilah kebijakan berusaha menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah proses untuk menghasilkan alternatif-alternatif dalam memecahkan suatu masalah.

Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah program untuk mencapai tujuan pada sektor publik dengan memilih sejumlah alternatif dalam keadaan keterpaksaan politik dan menerimanya untuk diimplementasikan²³. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa kebijakan merupakan kegiatan yang terbentuk melalui program untuk mencapai tujuan dengan memilih alternatif yang telah tersedia dan kemudian dilaksanakan. Hal ini perlu dipahami khususnya dengan program vaksinasi nasional dimana pemerintah melibatkan TNI sebagai unsur perbantuan dalam kebijakan tersebut.

3) Sinergi

Istilah sinergi merupakan perpaduan dari berbagai unsur atau elemen yang ada untuk menghasilkan *output* yang lebih baik melalui bekerja secara kelompok.²⁴ Sinergi dapat pula dipandang sebagai pendekatan yang efektif dalam pemecahan masalah karena dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih maksimal. Dalam penelitian ini, teori sinergi digunakan untuk menjelaskan proses dan upaya integrasi setiap lembaga terkait khususnya peran TNI dalam

²² William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Bulaksumur. Cetakan ke-5, halaman 22-23.

²³ Richard A. Chapman. 1997. The Treasury in Public Policy-Making, (London and New York: Routledge. Halaman 1.

²⁴ Stephen R. Covey, 2008, Kepemimpinan Yang Berprinsip. Jakarta: Binarupa Aksara.

mendukung program vaksinasi nasional sehingga mampu tercapainya ketahanan nasional.

10. Data dan Fakta

a. Penyebaran Covid-19

Penyebaran Covid-19 yang begitu luas hingga mencapai 118 negara dan telah menimbulkan dampak sistemik bagi kehidupan manusia menjadi dasar organisasi kesehatan dunia, WHO melalui Dirjen, Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa Covid-19 menjadi pandemi global.²⁵ Secara global jumlah kasus Covid-19 sudah mencapai 180.360.606 orang, dengan 165.083.854 diantaranya telah sembuh, sedangkan 3.907.364 lainnya meninggal dunia.²⁶

Adapun penyebaran virus Covid-19 masih terus di Indonesia saat ini semakin tinggi dimana kasus terkonfirmasi positif terakhir di Indonesia per tanggal 24 Juni 2021 telah mencapai 2.053.995 kasus dengan kasus aktif dimana sebanyak 171.542 orang Covid-19 dengan penyebaran di 510 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.²⁷ Dalam perkembangannya belakangan ini, penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga anak-anak. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, total jumlah kasus Covid-19 pada anak usia sekolah mencapai 235.527 kasus, jumlah ini setara 12,51 persen dari total kasus Covid-19.²⁸ Penyebaran virus pun semakin cepat karena ditemukannya varian baru atas virus tersebut seperti delta, alpha, beta, gamma, epsilon dan sebagainya yang dinilai mudah menular. Melihat kondisi yang demikian maka perlu penanganan yang terencana dengan baik sesegera mungkin dikarenakan Covid-19 telah mempengaruhi sektor ipoleksosbudhankam Indonesia.

²⁵ <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses 21 Juni 2021 pukul 22:00 WIB.

²⁶ Andari Wulan Nugrahani dalam <https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/24/update-corona-global-23-juni-2021-siang-jumlah-infeksi-covid-di-seluruh-dunia-lampau-1803-juta>, diakses 24 Juni 2021 pukul 22:32 WIB.

²⁷ <https://waspada.co.id/2021/06/update-covid-nasional-24-juni-angka-positif-bertambah-20-574-kasus-aktif-naik-jadi-171-542-orang/>, diakses 25 Juni 2021 pukul 11:21 WIB.

²⁸ <https://www.republika.id/posts/17850/lindungi-anak-anak>, diakses 24 Juni 2021 pukul 21:41 WIB.

b. Penanganan Covid-19 secara umum di Indonesia.

Dalam penanganan Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis diantaranya: menegakkan pentingnya perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), penegakkan 5M yang diperkuat dengan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang masih berlaku saat ini.

Adapun semenjak pemerintah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020, pembatasan aktivitas tersebut berdampak luas terhadap proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang berujung pada gangguan kinerja perekonomian. Di satu sisi pembatasan aktivitas melalui PSBB memang diperlukan untuk meminimalisir penularan virus, di sisi lain pembatasan aktivitas berdampak pada sektor ekonomi yang langsung dirasakan kelas menengah dan menengah bawah, seperti semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan, banyak masyarakat yang terkena PHK diakibatkan pembatasan karyawan dan usaha yang bangkrut diperkirakan mencapai 9,77 orang atau mengalami kenaikan dari sebelumnya 5,23 persen menjadi 7,07 persen,²⁹ bahkan hingga tercipta kelompok miskin dan rentan baru.

Kondisi ini diperkuat dengan situasi ekonomi dunia berdasarkan laporan IMF menunjukkan mengalami kemerosotan yakni minus 4,9 persen dimasa pandemi Covid-19 berakibat pada resesi bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia.³⁰ Senada dengan hal tersebut Menkeu RI, Sri Mulyani menjelaskan ekonomi Indonesia dimasa pandemi Covid-19 cukup terdampak, diperkirakan turun 2,3 persen

²⁹ <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/kspi-perkiraan-2021-bakal-terjadi-ledakan-phk-di-mana-mana/ar-BB1chyu1>, diakses 23 Juni 2021 pukul 19:21 WIB.

³⁰ *Ibid.*

atau kondisi terburuk bisa mencapai negatif 0,4 persen.³¹ Bahkan kondisi ini dapat berimbas pada krisis pangan sebagaimana dikatakan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu yang menjelaskan pandemi tidak hanya mengganggu kesehatan dunia tetapi juga memicu kelaparan global.³²

Adapun beberapa upaya pemerintah yang dilakukan sebagaimana telah disinggung dalam menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tertuang pada berbagai paket kebijakan, diantaranya: ³³ Efisiensi anggaran baik APBN ataupun APBD; Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mereview ulang anggaran yang sudah dibuat agar saat ini lebih memfokuskan pada perbaikan kesehatan dan ekonomi; Menjamin ketersediaan bahan pokok yang diiringi dengan menjaga daya beli masyarakat melalui program-program yang telah dibuat; Membangun program yang menstimulus perbaikan ekonomi dengan tetap menjaga aturan yang ada khususnya dimasa pandemi Covid-19; Memberikan bantuan kepada pemegang kartu sembako selama satu semester; Implementasi kartu pra-kerja untuk menekan dampak Covid-19 dibidang ekonomi; Membantu dalam pembayaran pajak; Memberikan kredit kepada pelaku UMKM; dan Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam KPR. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi nasional patut diapresiasi namun jika dilihat lebih mendalam maka langkah tersebut nyatanya belum mampu mendongkrak perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari terus bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di masa pandemi Covid-19, menurunnya daya beli, dan inkonsistensi pola penyaluran bantuan.³⁴

Selain itu pemerintah juga melakukan upaya lain dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yaitu melalui vaksinasi nasional. Per

³¹ <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>, diakses 19 Juni 2021 pukul 11:21 WIB.

³² *Ibid*

³³ Ihsanuddin dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=3>, diakses 28 Mei 2021 pukul 08:12 WIB.

³⁴ Fitria Chusna Farisa dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=5>, diakses 28 Mei 2021 pukul 08:19 WIB.

8 Juni 2021 jumlah penduduk yang sudah tervaksin mencapai 11,35 juta orang atau 28,14% dari target nasional.³⁵ Untuk mempercepat program tersebut maka Presiden meinstruksikan agar dapat melibatkan pihak-pihak terkait termasuk TNI yang dianggap memiliki kemampuan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis.

Dinamika lingkungan strategis baik skala nasional ataupun internasional selalu mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan pertahanan negara membawa secara langsung maupun tidak langsung terlebih dalam pandemi Covid-19. Situasi dan kecenderungan lingkungan strategis dimasa pandemi sangat kompleks sehingga memerlukan penanganan khusus yang terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak dominan yang menutup berbagai pihak-pihak terkait.

a. Global

Pandemi Covid-19 sebagaimana diketahui telah memberikan dampak strategis bagi kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi kasus COvid-19 akan meningkat menjadi 300 juta pada awal 2022. Hal ini melihat tren penularan kasus yang begitu cepat akhir-akhir ini. Per 4 Agustus 2021, total kasus Covid-19 secara global telah menembus angka 200 juta.³⁶ Untuk itu negara-negara di dunia terus berupaya dalam menangani penyebaran virus tersebut, seperti yang dilakukan China, dalam menghadapi pandemi Covid-19 China melakukan isolasi di Kota Wuhan, yang merupakan ibu kota Provinsi Hubei. Saat kasus terus bertambah dan semakin meluas, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengisolasi kota-kota lain di Provinsi Hubei. China juga melakukan pembangunan dua rumah sakit khusus untuk menangani

³⁵ Ferdian Ananda Majni dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/410379/113-juta-penduduk-indonesia-sudah-divaksin-covid-19>, diakses 19 Juni 2021 pukul 23:32 WIB.

³⁶ <https://www.solopos.com/who-prediksi-jumlah-kasus-covid-19-di-dunia-bisa-capai-300-juta-di-awal-2022-1147175>, diakses 21 Agustus 2021 pukul 14:00 WIB.

virus corona, yaitu RS Huoshenshan dan RS Leishenshan.³⁷ Kemudian Perancis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 kerajaan Perancis telah memerintahkan tinggal di rumah yang berlangsung selama 15 hari. Rakyat hanya boleh meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke pasar raya, farmasi atau kerja. Upaya ini dipandang efektif dalam menekan penyebaran Covid-19.³⁸ Selain itu Thailand, dalam menekan penyebaran virus tersebut Thailand telah mengisyaratkan darurat selama sebulan sebagai langkah membendung penularan wabah Covid-19 termasuk dengan mengambil langkah pengeluaran visa akan dihentikan sementara untuk banyak negara.³⁹ Upaya-upaya yang dilakukan beberapa negara tersebut merupakan bagian dari menekan penyebaran Covid-19 dengan tetap melakukan program vaksinasi secara massal agar mampu membentuk *herd immunity*.

b. **Regional.**

Penyebaran Covid-19 yang melanda hampir negara-negara di dunia termasuk Asia Tenggara pada dasarnya berdampak pada sistemik bagi kehidupan di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan Menteri Luar Negeri RI dijelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara yang dalam terminologi WHO terdiri dari India, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Maldives, Timor Leste, Myanmar, dan Bhutan mengalami kenaikan kasus tertinggi, yaitu 19 persen dilihat dari kurun waktu seminggu sampai 2 Mei 2021.⁴⁰ Situasi ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara menjadi penyumbang 47% dari kasus baru dunia selama kurun waktu tersebut. Menyikapi hal tersebut maka perlu peningkatan kewaspadaan atas massifnya penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah Asia Tenggara agar

³⁷ Vina Fadhotul Mukaromah dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/04/152217865/berikut-cara-indonesia-dan-negara-lain-tangani-virus-corona>, diakses 20 Agustus 2021 pukul 12:00 WIB.

³⁸ <https://www.astroawani.com/berita-dunia/covid19-ketahui-bagaimana-negara-lain-menangani-wabah-ini-235221>, diakses 19 Agustus 2021 pukul 13:31 WIB.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Yudi Rachman dalam <https://www.law-justice.co/artikel/108325/menlu--waspada-kasus-covid-19-di-asia-tenggara-naik-19-persen/>, diakses 1 Juni 2021 pukul 13:31 WIB.

dapat menekan kerugian yang ditimbulkan. Adapun dalam penanganan Covid-19, negara-negara wilayah regional mempunyai upaya-upaya yang berbeda sebagai contoh Vietnam, perwakilan WHO di Vietnam, Dr Kidong Park, kesuksesan pemerintah Vietnam adalah sebagai akibat dari sikap proaktif dan konsistensi sepanjang respons yang dilakukan. Setelah Vietnam mengumumkan peningkatan jumlah kasus Covid-19 menjadi 6 kasus, kementerian memerintahkan seluruh penduduk Son Loi untuk tinggal dalam isolasi selama 20 hari. Para pekerja kesehatan juga telah diperintahkan untuk mengikuti beberapa protokol dalam menguji infeksi dan tingkat keparahannya. Selain itu, kementerian menginstruksikan sekolah-sekolah untuk melakukan pembersihan kelas sebelum murid-murid melanjutkan pelajaran.⁴¹

c. **Nasional.**

Dalam kondisi internal atau dalam lingkungan nasional Indonesia, faktor lingkungan strategis dibahas melalui pendekatan astagatra. Namun secara spesifik lebih difokuskan pada aspek yang mempengaruhinya, yaitu:

- 1) **Geografi.** Kondisi geografi Indonesia yang cukup kompleks secara tidak langsung mempengaruhi penanganan Covid-19. Hal ini dapat terlihat khususnya di daerah-daerah terpencil dimana penanganan Covid-19 membutuhkan upaya ekstra agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan. Namun dengan memaksimalkan kemampuan TNI yang dimiliki dapat menjangkau kondisi geografi Indonesia yang sangat kompleks khususnya dalam penanganan Covid-19.
- 2) **Demografi.** Persebaran penduduk yang belum merata terlebih dikota-kota besar seperti yang terjadi di DKI Jakarta dimana sebagian masyarakat bekerja di wilayah tersebut tentu sangat berpotensi penyebaran virus Covid-19 jika tidak diterapkan

⁴¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/04/152217865/berikut-cara-indonesia-dan-negara-lain-tangani-virus-corona?page=3.>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 17:38 WIB.

aturan yang tegas. Data menunjukkan per 21 Mei 2021 dilansir kompas.com terdapat 5 Provinsi yang tingkat penyebarannya cukup tinggi yaitu: Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat.⁴² Selain itu kondisi demografi dimasa pandemi juga telah memberikan perubahan perilaku manusia karena keterbatasan hubungan langsung yang terbangun sehingga aktivitas dilaksanakan dalam bentuk WFH, dan pembelajaran jarak jauh. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka TNI dapat berperan dalam melakukan sosialisasi ataupun memberikan bantuan pembelajaran khususnya di daerah terpencil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

- 3) **Sumber Kekayaan Alam.** Letak geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan terbesar membuat Indonesia memiliki Sumber Kekayaan Alam (SKA) dengan jumlah yang besar dan beragam yang seyogyanya sangat mendukung dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, melimpahnya SKA di Indonesia tidak diimbangi dengan pengelolaan SKA yang dapat menghasilkan/bermanfaat bagi masyarakat⁴³. Belum tepatnya sistem pengelolaan SKA menjadi salah satu hambatan utama dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Pengelolaan SKA yang kurang sesuai dimana belum adanya *grand design* yang jelas khususnya dalam rencana jangka panjang menjadikan pengelolaan SKA cenderung tidak maksimal terlebih dimasa pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana disinggung Presiden Joko Widodo agar Indonesia harus mewaspadaai krisis pangan yang mungkin terjadi dimasa Covid-19 mengingat seluruhnya kebutuhan masyarakat

⁴² Tatang Guritno dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/18060091/update-5034-kasus-baru-covid-19-tersebar-di-30-provinsi-riau-terbanyak?page=2>, diakses 30 Mei 2021 pukul 10:30 WIB.

⁴³ Anwar, Affendi dan Rustiadi, Ernani. "Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya". <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24803/115-Masalah%20Pengelolaan%20Sumberdaya%20Alam%20dan%20Kebijakan%20Ekonomi%20bagi%20Pengendalian%20terhadap%20Kerusakannya.PDF?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 30 Mei 2020 pukul 10.43 WIB.

dapat dipenuhi secara mandiri.⁴⁴ Untuk itu perlu pengelolaan yang lebih baik agar SKA dapat dimaksimalkan keberadaannya sehingga dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional.

- 4) **Ideologi.** Kecenderungan melemahnya pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di wilayah rawan (lihat data Labkurtannas). Padahal jika ditelaah lebih dalam Pancasila memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19. Hal ini hanya dapat dilakukan jika Pancasila mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan hidupnya ideologi dalam masyarakat.
- 5) **Politik.** Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang diterapkan pada dasarnya merupakan bentuk kemajuan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan seluruh komponen negara menjadi suatu keharusan tak terkecuali dalam penanganan Covid-19. Hal ini perlu dipahami karena apabila pemerintah dianggap kurang mampu dalam menghadapi Covid-19 maka sangat berpotensi menimbulkan krisis politik yang terlihat dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelola negara. Untuk itu pemerintah dalam konteks ini harus mengambil langkah-langkah strategis agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
- 6) **Ekonomi.** Krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 tidak hanya berlaku secara global namun pada skala nasional. Laporan bulan Mei 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,75 juta orang.⁴⁵ Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian akibat penyebaran virus Covid-19 menyebabkan harus mengambil langkah dilematis yaitu PHK. Selain itu Covid-19 juga berimbas pada melemahnya konsumsi rumah tangga serta melemahnya investasi yang berakibat pada

⁴⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4237990/peneliti-krisis-pangan-dampak-pandemi-corona-covid-19-harus-diwaspadai>, diakses 31 Mei 2021 pukul 11:21 WIB.

⁴⁵ <https://economy.okezone.com/read/2021/05/27/320/2416076/data-terbaru-jumlah-pengangguran-ri-ada-8-75-juta-orang>, diakses 1 Juni 2021 pukul 11:00 WIB.

terhentinya usaha. Kondisi ini secara langsung tentu sangat mempengaruhi ekonomi nasional sehingga perlu langkah-langkah terukur agar persoalan ekonomi mendapatkan diatasi dengan sebaik-baiknya.

- 7) **Sosial Budaya.** Keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan anugerah sekaligus berpotensi menjadi penghambat dalam kegiatan ekonomi. Kompleksnya nilai budaya di masing-masing masyarakat dapat menciptakan nilai-nilai serta norma-norma aturan sosial yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan nilai-nilai tersebut berpotensi dan berdampak terhadap pola kerja dalam kegiatan ekonomi di setiap kelompok masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan penanganan Covid-19
- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Covid-19 yang berdampak luas bagi kehidupan manusia ternyata mempengaruhi pertahanan-keamanan. Sebagai ancaman non-tradisional, pandemi Covid-19 perlu dipahami dan mendapatkan penanganan serius. Karena selain merupakan krisis kesehatan ternyata Covid-19 juga dianggap sebagai senjata biologis sebagaimana disampaikan Ngasiman Djoyonegoro selaku Direktur Eksekutif for *Center of Intelligent and Strategic Studies (CISS)*.⁴⁶ Untuk itu maka diperlukan upaya biodefense dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

⁴⁶ Cahya Mulyana dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/329022/pandemi-covid-19-juga-berdampak-ke-pertahanan-dan-keamanan>, diakses 1 Juni 2021 pukul 11:50 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi telah memberikan dampak sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Berbagai aspek kehidupan terdampak akibat penyebaran virus Covid-19. Perlu adanya langkah-langkah strategis salah satunya dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk TNI dalam mendukung tercapainya program vaksinasi nasional. Melalui kekuatan dan kemampuan TNI diharapkan mampu untuk dapat mensukseskan program vaksinasi dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 sehingga akan berdampak pada terwujudnya ketahanan nasional. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai urgensi vaksin, kekuatan dan kemampuan TNI untuk mendukung program dan target vaksinasi pemerintah, pelibatan kemampuan TNI dalam penanganan Covid-19 dan optimalisasi pelibatan TNI dalam mewujudkan ketahanan nasional.

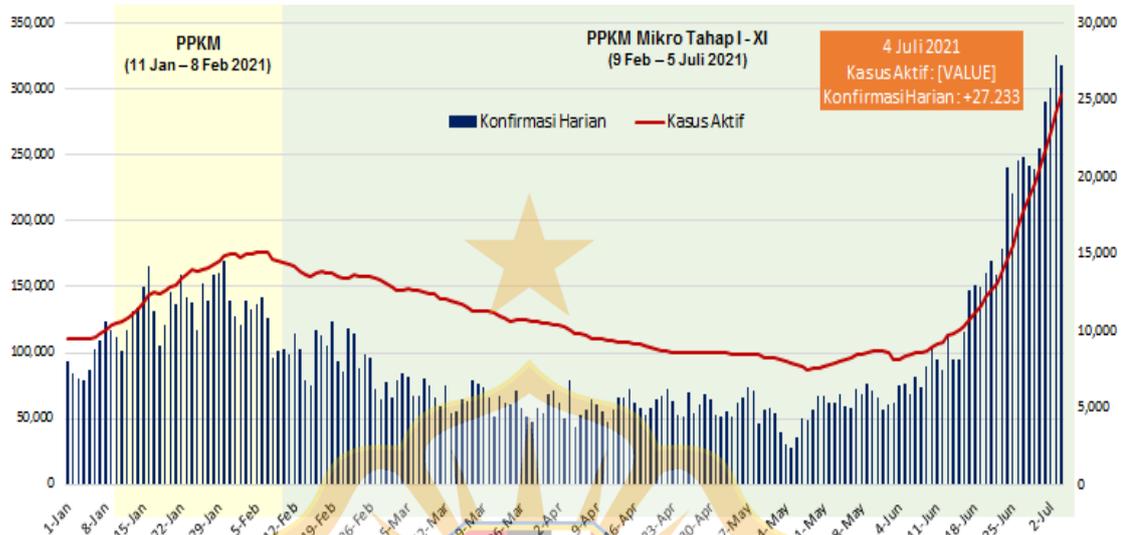
13. Urgensi Vaksin melalui Program Vaksinasi Nasional.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Covid-19 yang sampai saat ini masih cukup tinggi penyebarannya belum ditemukan obatnya. Data menyebutkan untuk kasus di Indonesia saat ini kasus positif Covid-19 per 20 Agustus 2021 telah mencapai 3.950.304 kasus.⁴⁷ Jumlah ini akan terus bertambah terlebih penyebaran Covid-19 masih terus terjadi, ditambah lagi dengan ditemukannya berbagai varian baru atas virus tersebut. Karakter pandemi Covid-19 yang mampu berkembang menuntut adanya langkah-langkah terukur dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun jika dilihat dari total kasus & total kematian akibat Covid-19 per sejuta penduduk, Indonesia bukan terburuk di dunia. Namun untuk kasus harian per sejuta penduduk, angka harian Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara lain dimana

⁴⁷ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-20-agustus/1>, diakses 21 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB.

Indonesia menempati posisi 14 dunia.⁴⁸ Bahkan kasusnya cenderung meningkat.⁴⁹ Dengan uraian sebagai berikut:

Gambar 4.1: Perkembangan Kasus Konfirmasi Harian & Kasus Aktif Covid-19



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2021

Kondisi ini tentu berdampak pada terbatasnya ketersediaan ruangan untuk rawat di rumah sakit atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Melihat penyebaran Covid-19 yang semakin massif maka pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah Jawa-Bali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagian besar negara termasuk Indonesia yakni dengan melakukan vaksinasi secara nasional. Secara umum Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri, yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk

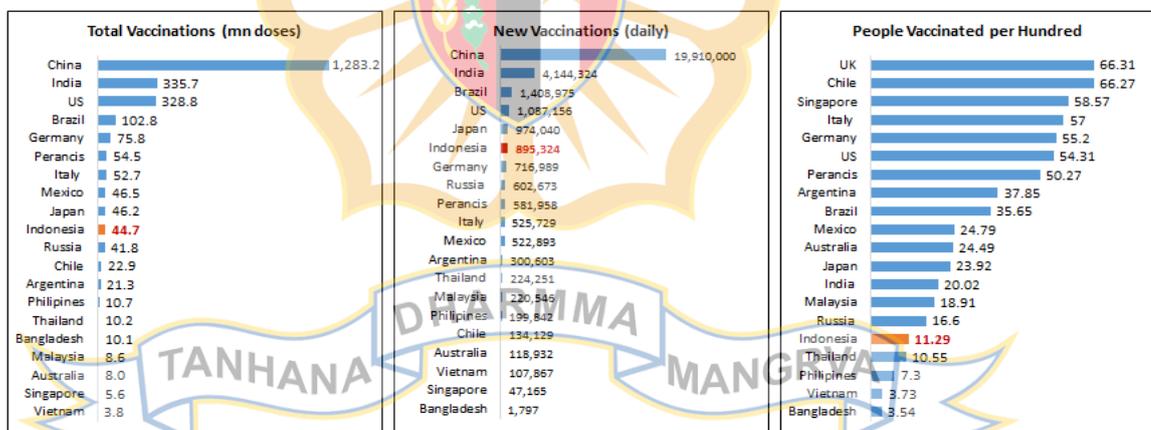
⁴⁸ Our World in Data with latest available data on 2nd July dalam paparan Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Eksekutif Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) tentang Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021.

⁴⁹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-jumat-9-juli/1>, diakses 10 Juli 2021 pukul 22:51 WIB.

mengenali mikroorganisme tersebut. Dengan pemberian vaksin tersebut khususnya dalam menghadapi Covid-19 diharapkan akan terbangun kekebalan secara massal sehingga diharapkan mampu menekan penyebaran virus tersebut.

Lebih lanjut layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin Covid-19 harus melalui tiga tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut dan dinyatakan efektif serta aman digunakan, vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini, sudah ada vaksin Covid-19 yang memasuki uji klinis tahap III di Indonesia. Penelitian terhadap vaksin Covid-19 tersebut melibatkan 1.620 sukarelawan. Bila riset ini berjalan lancar, vaksin Covid-19 diprediksi dapat tersedia dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2022.⁵⁰ Adapun terkait dengan program vaksinasi yang dilaksanakan di Indonesia harus diakui masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2: Perbandingan Vaksinasi dengan Negara-negara lain



Sumber: WHO, 2021

Gambar di atas menjelaskan bahwa percepatan vaksinasi baru 11/100 penduduk Indonesia yang sudah divaksin sampai dengan 2 Juli 2021. Hal ini menunjukkan bahwa laju kecepatan vaksinasi Indonesia cukup tertinggal dibanding negara dengan kondisi demografi sejenis seperti China, India dan Brazil. Dengan laju vaksinasi saat ini maka akan berimbas pada pemulihan

⁵⁰ <https://medan.tribunnews.com/2021/08/21/apa-itu-vaksin-sinovac-dan-astrazeneca-ketahui-gejala-yang-muncul-dan-efek-sampingnya>, diakses 18 Agustus 2021, pukul 15:31 WIB.

ekonomi yang terancam terhambat karena tertinggal dari pemulihan ekonomi global. Untuk itu Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan dengan target vaksinasi minimal 1,5-2 juta suntikan per hari. Karena hal tersebut diakui mampu berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Untuk itu maka dibutuhkan upaya-upaya terukur agar target vaksinasi nasional tersebut dapat tercapai.

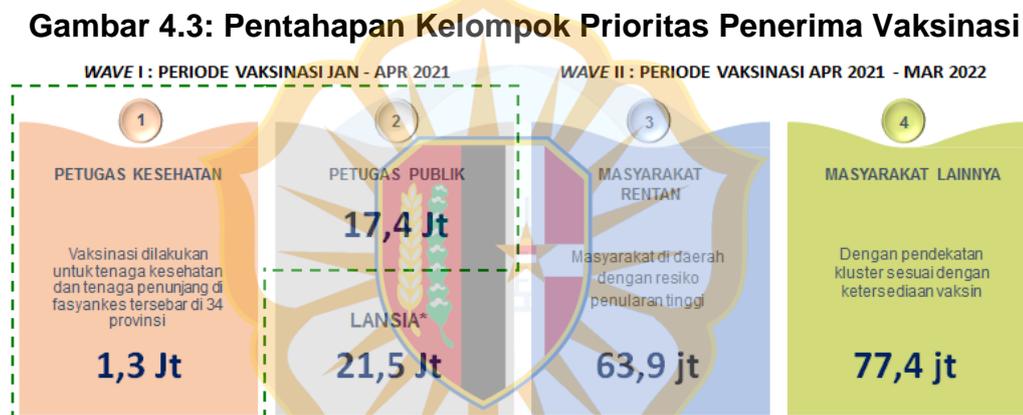
Adapun salah satu faktor beberapa negara lebih baik dalam distribusi dan proses vaksinya dikarenakan mampu cukup optimal mengerahkan dan melibatkan militer, baik dalam vaksinasi maupun penanggulangan Pandemi secara umum. Sebagai contoh, Vietnam dan China dua negara yang dinilai cukup berhasil dalam menanggulangi pandemi dan mendistribusikan vaksin selalu dengan optimal menggunakan melibatkan militer dalam hal tersebut. Militer merupakan aktor utama dalam penelusuran kontak berskala besar. Militer dari kedua negara tersebut juga membantu dalam mendata dan mengisolasi masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien Covid-19 hingga ke level 2 dan level 3. Perlibatan militer secara optimal dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait sejak awal memudahkan proses vaksinasi selanjutnya, dimana distribusi dan proses pemberian vaksin dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Melihat urgensi dari vaksin tersebut, langkah cepat dan terukur dengan mengambil kebijakan vaksinasi nasional merupakan yang paling relevan. Dalam konteks Indonesia program vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk menekan bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia menargetkan 181,5 juta penduduk sudah tervaksinasi hingga akhir tahun.⁵¹ Dalam mencapai target tersebut pemerintah pun membagi pada beberapa tahapan, seperti dijelaskan Kemenkes sebagai *leading sector* atas program tersebut yaitu: tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan pada Januari hingga April 2021, sedangkan tahap 3 dan tahap 4 dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022.⁵²

⁵¹ <https://koran.tempo.co/read/ragam/465986/pemerintah-mengejar-target-vaksinasi-1815-juta-jiwa-sampai-akhir-2021-untuk-mengejar-kekebalan-komunal?>, diakses 1 Juli 2021 pukul 17:05 WIB.

⁵² Retia Kartika Dewi dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/09/200200965/4-tahapan-vaksinasi-covid-19-dan-jadwal-pelaksanaannya>, diakses 1 Juli 2021 pukul 21:00 WIB.

Adapun untuk sasaran tahap 1 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes), asisten nakes, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan kedokteran yang fokus pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tahap 2 ditujukan untuk petugas pelayanan publik seperti TNI-Polri, aparat pemerintah lainnya yang konsen pada pemberi layanan kepada masyarakat dan kelompok usia lanjut usia 60 tahun ke atas. Tahap 3 merupakan kelompok yang terdiri atas masyarakat rentan dari geospasial, sosial dan ekonomi, sedangkan tahap 4 dikategorikan sebagai kelompok penerima vaksin yang terdiri dari masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin. Hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Paparan Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tentang Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tahun 2021

Dalam pemberian vaksin sebagai *role model* dilakukan pada Presiden dan Wakil Presiden, pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi kesehatan dan pimpinan kunci institusi kesehatan di daerah serta tokoh agama dimasyarakat. Langkah ini sebagai contoh agar dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta menerima vaksin. Selain itu pemerintah pun menjamin bahwa vaksin yang diberikan aman dan berkualitas. Terkait dengan jenis vaksin yang digunakan di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dimana vaksin tersebut diproduksi oleh perusahaan lokal dan internasional,

yaitu Bio Farma, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.⁵³ Untuk dua vaksin Moderna, dan Pfizer saat ini masih dalam proses pengadaan namun keenam vaksin tersebut telah dilakukan uji klinis terlebih dahulu sehingga dipandang aman untuk digunakan.

Kebijakan vaksin yang digagas pemerintah dalam konteks ini perlu dilihat secara komprehensif sehingga mampu melihat urgensi dari program tersebut. Dalam konteks ini kebijakan vaksin merupakan bagian dalam memecahkan persoalan yang dihadapi khususnya menekan penyebaran Covid-19, dimana didalamnya meliputi formulasi kebijakan didasarkan atas tingginya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga perlu adanya penanganan lanjut atas persoalan tersebut. Kemudian adopsi kebijakan yakni alternatif atas masalah tersebut, maka pemerintah mengambil program vaksinasi dalam mempercepat penanganan Covid-19. Selanjutnya yaitu implementasi dan diiringi dengan evaluasi atas program yang dijalankan. Hal ini untuk mendapatkan *feedback* sekaligus melihat efektivitas atas program yang dijalankan.

Adapun untuk mendukung program vaksinasi tersebut maka pemerintah berusaha menjaga ketersediaan vaksin. Hal ini dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.1: Ketersediaan Vaksin per 20 Agustus 2021

	Penerimaan	Pemakaian	Stock Dosis Vaksin	Rerata Vaksinasi Minggu Lalu	Estimasi Sisa Hari Dari Stock
Nusa Tenggara Timur	902,653	840,241	62,412	12,364	5.05
Jambi	1,149,270	1,053,874	95,396	12,716	7.50
Sumatera Utara	2,710,050	2,378,980	331,070	43,172	7.67
Jawa Barat	14,724,044	12,659,315	2,064,729	200,541	10.30
Kalimantan Timur	1,179,440	1,040,858	138,582	12,454	11.13
Sulawesi Selatan	2,917,292	2,638,836	278,456	24,871	11.20
Banten	3,461,696	2,748,192	713,504	60,859	11.72
Riau	1,656,536	1,510,356	146,180	11,707	12.49
Sulawesi Tengah	412,390	343,360	69,030	5,189	13.30
Lampung	984,480	782,950	201,530	13,821	14.58
Sumatera Selatan	2,154,300	1,873,648	280,652	19,222	14.60
Bali	4,745,756	4,076,648	669,108	45,726	14.63
Jawa Timur	11,774,070	9,448,012	2,326,058	153,058	15.20
Nusa Tenggara Barat	983,142	848,180	134,962	8,630	15.64
Estimasi Sisa Hari Dari Stock		Lebih dari 14 hari 25 Provinsi	10 - 14 hari 6 Provinsi	7 - 10 hari 2 Provinsi	Kurang dari 7 hari 1 Provinsi

Sumber: kemkes.go.id, 2021

⁵³ Rika Anggraeni dalam <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210113/106/1342384/6-jenis-vaksin-covid-19-di-indonesia-sinovac-astrazeneca-hingga-pfizer>, diakses 1 Juli 2021 pukul 19:05 WIB.

Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan vaksin masih tergolong aman untuk dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Dalam keterangan lain sebagaimana disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ketersediaan vaksin di Indonesia masih terjaga. Hal ini terlihat dimana Pemerintah Indonesia telah menerima 83,9 juta dosis vaksin Covid-19.⁵⁴ Namun demikian jika ditelaah lebih lanjut vaksin yang diproduksi masih menghadapi kendala, Ketua Satgas (Pemulihan Ekonomi Nasional) PEN, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan pemerintah tengah dihadapi persoalan proses produksi vaksin Covid-19 secara massal. Permasalahan muncul ketika pemerintah menargetkan Bio Farma dapat memproduksi vaksin corona sebanyak 246 juta dosis per tahunnya. Namun, Bio Farma hanya menyanggupi untuk memproduksi 30 juta dosis.⁵⁵ Kondisi ini tentu menjadi persoalan serius sehingga membutuhkan upaya-upaya strategis agar vaksin yang dibutuhkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam mempercepat target yang telah ditetapkan.

Persoalan lainnya, Indonesia sampai Mei 2021 memiliki sebanyak 91 juta dosis vaksin. Sementara dengan target sasaran vaksinasi 181,5 juta penduduk, jumlah vaksin yang diperlukan sekitar 363 juta dosis, artinya persediaan vaksin sampai Mei 2021 hanya sekitar 25% dari Kebutuhan dan vaksin dalam jumlah besar baru akan tiba setelah Juni 2021.⁵⁶ Selain itu, kesiapan infrastruktur pendukung dan SDM. Hal ini dapat terlihat pada minimnya tenaga vaksinator di daerah dan terbatas jumlahnya. Untuk itu maka dalam percepatan vaksinasi Covid-19, perlu ditingkatkan infrastruktur pendukung dan SDM agar pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian persoalan lain yang juga menjadi kendala dalam program vaksinasi yaitu banyaknya masyarakat yang gagal divaksinasi karena tidak lolos *screening*, sehingga penyerapan vaksinasi masih rendah. Persoalan-persoalan tersebut jika tidak mendapatkan perhatian serius maka akan mengganggu tercapainya tujuan yang ditetapkan.

⁵⁴ Dian Erika Nugraheny dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/19065841/satgas-ketersediaan-terjaga-839-juta-dosis-vaksin-covid-19-diterima>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB.

⁵⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/kendala-produksi-vaksin-butuh-246-juta-bio-farma-hanya-mampu-30-juta-setahun-1ukkX5RL1rW/3>, diakses 17 Agustus 2021 pukul 18:31 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*

Berdasarkan persoalan yang terjadi khususnya dalam masalah vaksin Covid-19, maka perlu adanya beberapa langkah terukur sehingga program vaksinasi yang dijalankan dapat berjalan sesuai harapan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana pendukung untuk dapat mendorong produksi vaksin agar lebih produktif.
- 2) Membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, tidak hanya dari luar negeri sebagai pemasok bahan baku vaksin tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak farmasi dalam negeri sehingga produksi vaksin dapat terus ditingkatkan.
- 3) Meningkatkan riset atau penelitian yang dilakukan SDM dalam negeri dalam memproduksi vaksin. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia tidak selamanya tergantung dengan negara lain khususnya berkenaan dengan vaksin sehingga mampu memproduksi secara mandiri.
- 4) Meningkatkan kontrol terhadap vaksin yang diproduksi sehingga dapat dijamin kualitas maupun kuantitas vaksin yang digunakan.
- 5) Mengawal dan mengakselerasi pengembangan vaksin Merah Putih, dimana saat ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam menangkal Covid-19, sehingga perlu dikawal dan dipastikan dapat diproduksi pada tahun 2022, baik sebagai vaksin utama maupun *booster*. Dengan ketersediaan vaksin tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan Covid-19. Karena sebagaimana diketahui bahwa saat ini sebagian besar negara di dunia sangat menggencarkan program vaksinasi nasional dalam membentuk daya tangkal masyarakat terhadap virus Covid-19.

14. Kekuatan dan Kemampuan TNI dalam Mendukung Program Vaksinasi Nasional

Pada dasarnya virus corona ini memiliki sifat memang hidupnya di saluran pernapasan dan ada sebagian di saluran cerna. Menularnya dengan cara dilontarkan ke luar (droplet), karenanya virus ini tidak bisa hidup sendiri. Untuk bereplikasi, virus ini butuh sel hidup. Adapun penyebarannya bisa terlempar paling jauh sekitar 1,8-meter hingga dua meter. Sifat pandemi Covid-19 yang cepat menyebar, ditambah lagi belum adanya obat yang dipandang mampu mengobati virus tersebut menjadikan virus ini sangat mengancam kehidupan

manusia. Berdasarkan data Johns Hopkins University terdapat 4.371.025 orang di dunia tercatat telah meninggal dunia akibat Covid-19.⁵⁷ Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan masih tingginya penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai varian barunya yang belakangan bermunculan.

Dalam menghadapi masalah tersebut tentu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, salah satunya TNI sebagai unsur perbantuan dalam penanganan Covid-19. Kekuatan dan kemampuan TNI sebagaimana diketahui dipandang mampu dalam mempercepat penanganan Covid-19 terutama berkaitan dengan vaksinasi nasional. Kekuatan yang dimaksud yakni berhubungan dengan ketersediaan personel, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki TNI seperti rumah sakit permanen ataupun rumah sakit lapangan, alat transportasi darat, laut dan udara yang sangat membantu dalam penanganan Covid-19.

TNI dalam menghadapi mensukseskan vaksinasi nasional mengerahkan 63.207 personil di 34 provinsi di Indonesia dan kemudian melakukan penebalan kekuatan sebanyak 8.250 personil di 43 Kabupaten/Kota berstatus zona merah, ditambah lagi dengan pengerahan tenaga vaksinator TNI sebanyak 11.675 personil.⁵⁸ Pengerahan kekuatan TNI tersebut menjadi sangat diperlukan ditengah penanganan Covid-19 yang membutuhkan upaya cepat dan tepat. Hal ini menjadi penting dilakukan agar Pemerintah mampu mencapai target vaksinasi tersebut. Untuk itu vaksinasi tidak hanya memaksimalkan peran Kemenkes tetapi juga didukung TNI-Polri, Pemda dan pihak-pihak terkait lainnya dengan harapan mampu meningkatkan kecepatan penyuntikan vaksin covid-19 menjadi 700 ribu/hari di bulan ini dan 1 juta/hari mulai bulan depan atau Juli 2021.⁵⁹

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti rumah sakit yang bisa membantu dalam percepatan vaksinasi dapat terlihat penyebaran rumah sakit TNI-Polri tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti terlihat dibawah ini:

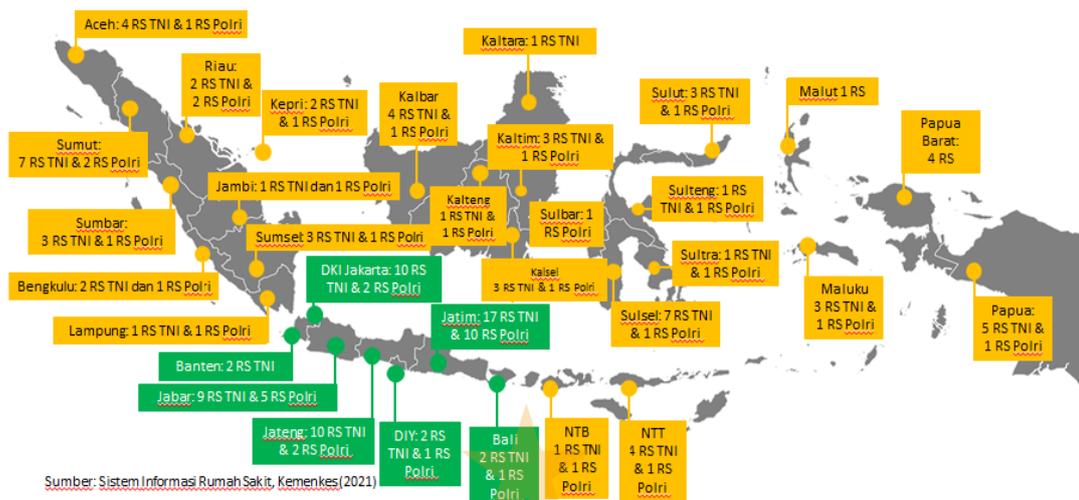
Gambar 4.4: Rumah Sakit TNI dan POLRI membantu Penanganan

⁵⁷ <https://www.liputan6.com/global/read/4634010/17-agustus-2078-juta-kasus-covid-19-di-dunia-47-juta-dosis-vaksin-disalurkan>, diakses 18 Agustus 2021, pukul 18:13 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/413616/percepatan-vaksinasi-covid-19-sebanyak-1-juta-perhari-mulai-juli-2021>, diakses 2 Juli 2021 pukul 21:12 WIB.

Covid-19



Sumber: Kemenkes, 2021

Kondisi ini tentu sangat membantu dalam mendukung program vaksinasi sehingga mampu mencapai target yang diharapkan. Adapun TNI dalam hal ini juga didukung dengan peralatan angkut yang dapat digunakan dalam melakukan distribusi vaksin hingga ke daerah-daerah pedalaman. Apalagi beberapa TNI juga memiliki basic bidang kesehatan sehingga dapat mendukung percepatan program vaksinasi nasional. Kekuatan TNI ini jelas sangat dibutuhkan karena tidak semua tenaga medis mampu menjangkau daerah-daerah terisolir.

Namun demikian pada pelaksanaannya pengerahan kekuatan TNI ternyata masih menghadapi berbagai persoalan diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana, seperti ketersediaan rumah sakit permanen dan rumah sakit lapangan yang terbatas mengingat jumlah kasus baru yang terus bertambah secara signifikan. Berdasarkan laporan Kemenkes bahwa hampir seluruh rumah sakit di Indonesia penuh pasien Covid-19 bahkan rumah sakit permanen yang dibangun ternyata juga mulai tidak mampu menampung. Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan jumlah pasien rawat inap pada 2 September 2020 berjumlah 19.467 orang, bertambah dari jumlah bulan Juli 2020 yaitu 17.821 orang. Lebih lanjut, persentase keterpakaian tempat tidur ruang isolasi tertinggi berada di provinsi Bali, disusul DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Sedangkan, persentase keterpakaian ICU tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta, disusul Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Kalimantan Selatan.⁶⁰

Selain itu kotak pendingin untuk menyimpan vaksin bagi daerah-daerah pedalaman yang masih sangat terbatas. Hal ini perlu dipahami karena penyimpanan vaksin pada dasarnya harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk menjamin kualitas vaksin tetap terjaga sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penyimpanan vaksin Covid-19 diatur sedemikian rupa untuk menghindari kesalahan pengambilan, perlu disimpan secara terpisah dalam rak atau keranjang vaksin yang berbeda agar tidak tertukar dengan vaksin rutin. Apabila memungkinkan, vaksin Covid-19 disimpan dalam *vaccine refrigerator* yang berbeda, dipisahkan dengan vaksin rutin. Ruang penyimpanan harus tersedia sumber listrik (dan cadangan) sehingga suhu tempat penyimpanan vaksin stabil di suhu 2-8⁰C. Penyimpanan vaksin bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki *vaccine refrigerator* standar (buka atas sesuai Pre-Kualifikasi WHO), masih dapat memanfaatkan lemari es domestik/rumah tangga, dimana penataan vaksin dilakukan berdasarkan penggolongan sensitivitas terhadap suhu dan sesuai manajemen vaksin yang efektif.

Suhu dalam penyimpanan vaksin harus terjaga sesuai dengan yang direkomendasikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan suhu menggunakan alat pemantau suhu. Alat pemantau suhu terdiri dari alat pemantau suhu (termometer, termometer muller, dan lain sebagainya), alat pemantau dan perekam suhu terus menerus, dan alat pemantau dan perekam suhu dengan teknologi *Internet of Things* (IoT) terus menerus secara jarak jauh. Mekanisme pemantauan suhu adalah sebagai berikut.⁶¹

- 1) Dilakukan pemantauan suhu sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan sore, pastikan suhu tetap 2-8⁰C;
- 2) Catat hasil monitoring suhu pada grafik pemantauan suhu; dan
- 3) Apabila menggunakan alat pemantau dan perekam suhu terus menerus secara jarak jauh yang sudah terhubung dengan aplikasi

⁶⁰ Ardito Ramadhan dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/17333731/rumah-sakit-makin-penuh-satgas-dorong-redistribusi-pasien-covid-19>, diakses 7 Juli 2021 pukul 21:21 WIB.

⁶¹ *Ibid.*

SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), maka petugas dapat memantau suhu dari jarak jauh melalui aplikasi.

Berdasarkan persoalan tersebut maka pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi maka perlu dioptimalkan terlebih dalam menjalankan tugas OMSP yang diemban. Sejalan dengan hal tersebut optimalisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas suatu sistem, seperti mengurangi biaya dan waktu proses, meningkatkan keuntungan, dan sebagainya.⁶² Adapun optimalisasi dalam konteks digunakan untuk menemukan aspek-aspek OMSP TNI dan komando lembaga yang terlibat yang perlu dan masih dapat ditingkatkan keefektifan dan keefisienannya khususnya dalam keterlibatannya di dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam distribusi dan pelaksanaan vaksin.

Maka, dalam konteks vaksinasi ini prinsip optimalisasi dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan oleh semua tingkat administratif dan Tim Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19, pemantauan kegiatan wajib dilakukan dengan tujuan memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan panduan standar, dan memberikan umpan balik tepat waktu untuk perbaikan-perbaikan bilamana perlu. Pembentukan tim seperti monitoring, disertai penyusunan peran dan tanggung jawab dan jadwal pemantauannya perlu dilakukan saat proses perencanaan (*mikro planning*). Pada pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung; pengiriman umpan balik kepada pengambil kebijakan, pelaksana vaksinasi dan semua pihak yang terlibat; serta melalui pertemuan review/evaluasi baik tatap muka maupun daring, secara rutin. Monitoring cakupan vaksinasi serta distribusi dan penggunaan vaksin dan logistik dilakukan oleh setiap tingkatan administrasi dengan cara mengakses *dashboard* Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Umpan balik dilakukan untuk setiap tahapan pelaksanaan (pra pelaksanaan, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan) melalui surat resmi yang disampaikan secara berjenjang, menggunakan teknologi sistem informasi atau secara langsung pada saat melaksanakan kegiatan supervisi. Kegiatan vaksinasi

⁶² *Ibid.*

Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari penanggulangan pandemi Covid-19 yang melibatkan multisektor. Untuk itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara bersama agar vaksinasi dapat sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan persoalan yang dihadapi maka perlu dilakukan berbagai upaya agar pelibatan kekuatan TNI untuk mendukung program dan target vaksinasi pemerintah dapat benar-benar tercapai, yakni dengan melakukan optimalisasi kekuatan TNI yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kekuatan TNI melalui pembekalan atas vaksinasi dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung agar mampu mendorong tercapainya program vaksinasi nasional.
- 2) Pelibatan TNI dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 perlu dirancang secara matang dengan melihat aspek-aspek yang ada meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, dimana keseluruhan tahapan ini akan didukung oleh sistem informasi terintegrasi. Hal ini menjadi sangat diperlukan agar kekuatan TNI yang dimiliki mampu dioptimalkan.
- 3) TNI dalam hal ini Babinsa perlu meningkatkan edukasi atas pemberian vaksinasi Covid-19 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Langkah ini merupakan upaya agar masyarakat tidak menolak vaksin sehingga mampu mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19.
- 4) Untuk lebih memaksimalkan kekuatan yang ada, maka perlu melibatkan tenaga kesehatan TNI yang baru lulus pendidikan serta tenaga kesehatan dari Satuan Tempur (Satpur) agar mendukung pencapaian program vaksinasi nasional.
- 5) Mendorong agar pelibatan TNI sesuai dengan prosedur manajemen vaksin yang efektif, khususnya dalam prasarana untuk penyimpanan vaksin bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki vaccine refrigerator standar (sesuai Pre-Kualifikasi WHO), selain itu juga dilakukan dengan penataan vaksin berdasarkan penggolongan sensitivitas terhadap suhu.

- 6) TNI perlu membangun komunikasi publik yang lebih efektif agar masyarakat dapat memahami vaksinasi dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.
- 7) Membuat dan mendesain *action plan* (Rencana Aksi) dan strategi prioritas sasaran terhadap distribusi dan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan daerah (*bottom up*) berbasis Banjar/Dusun/Lingkungan/Desa.
- 8) Menentukan Daerah Zona Risiko Tinggi, Sedang dan Rendah. Langkah ini menjadi diperlukan agar terdapat skala prioritas sehingga dapat mendorong tercapainya target vaksinasi nasional. Hal ini juga berkaitan dengan menentukan target prioritas penerima vaksin: lansia, Komorbid (dua atau lebih penyakit pada orang yang sama), para pekerja dengan Mobilitas Tinggi (pedagang pasar, ojek online dan lain-lain), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Sebagai Trigger.
- 9) Dalam pengerahan kekuatan yang dimiliki, TNI perlu mengatur teknik pelaksanaan vaksin (pengaturan flow, waktu, tempat dan jarak pada saat pelaksanaan vaksinasi agar tidak terjadi kerumunan).
- 10) Kepala Daerah agar mendorong dinas kesehatan dan mendukung penuh serta dapat memimpin langsung pelaksanaan vaksinasi di daerah masing-masing.
- 11) Terkait daerah yang sulit dijangkau seperti kategori 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), perlu memaksimalkan peran Aparat Kowil dalam hal ini Kodam, Korem, dan Kodim yang ada pada tiap daerah untuk memanfaatkan jejaring agar distribusi vaksin lebih mudah. Hal ini perlu didukung oleh pemerintah daerah setempat sehingga dibutuhkan adanya sinergitas program dan kebijakan yang sesuai dengan konstitusi. Aparat Kowil berkerjasama dengan Pemda perlu untuk membangun jejaring yang tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil, baik itu badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan sebagainya sehingga mampu mempercepat tercapainya program vaksinasi. Adapun upaya kerja sama yang dilakukan dengan jejaring tersebut untuk:
 - a. Terciptanya dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
 - b. Koordinasi penyediaan tempat vaksinasi Covid-19;
 - c. Keamanan;

- d. Sosialisasi dan penggerakan masyarakat;
- e. Penyediaan tenaga non-kesehatan; dan
- f. Pengelolaan limbah medis setelah vaksin.

Upaya-upaya tersebut perlu dipahami karena secara umum tujuan utama pemberian vaksinasi Covid-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 dan mengurangi transmisi/penularan Covid-19. Selain itu, diharapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga dapat melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh serta menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Namun demikian yang juga perlu dipahami bahwa pada dasarnya vaksinasi Covid-19 dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan, sehingga meskipun vaksin telah tersedia, protokol kesehatan melalui strategi 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap harus dilakukan dengan optimal. Pemberian vaksin ini diharapkan mampu memberikan kekebalan komunitas dan mampu mengendalikan pandemi.

15. Pelibatan TNI dalam Mendukung Vaksinasi guna Mewujudkan Ketahanan Nasional.

Pelibatan TNI dalam program vaksinasi nasional pada dasarnya mengacu UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 yaitu berkaitan dengan OMSP. TNI dalam konteks ini memiliki peran sebagai perbantuan dalam mensukseskan program vaksinasi nasional sebagaimana digagas pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Selain itu UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pelibatan TNI menjadi dapat dilakukan dalam kondisi keadaan darurat bencana dimana BNPB memiliki kemudahan akses termasuk komando untuk memerintahkan sektor/lembaga termasuk TNI untuk terlibat aktif pada penanganan bencana khususnya menghadapi Covid-19 khususnya dalam konteks ini terkait vaksinasi nasional.

Dengan terselenggaranya vaksin diharapkan akan membentuk kesehatan masyarakat yang baik sehingga akan berimbas pada perbaikan sektor-sektor kehidupan lainnya. Hal ini perlu dipahami dengan baik, karena saat ini vaksin merupakan upaya yang sangat memungkinkan dilakukan dalam menekan

penyebaran Covid-19 dengan didukung upaya-upaya lainnya sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan ketahanan nasional.

Oleh karena itu pelibatan TNI menjadi sangat diperlukan mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim dan Koramil hingga Babinsa yang memiliki organisasi satu Komando dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengerahan satuan tersebut tak terkecuali Satuan Kewilayahan Kodam dan Satuan Tempur (Satpur) dari Sabang sampai Merauke, dengan harapan mampu membantu dalam penanganan Covid-19. Pengerahan satuan-satuan dipandang perlu dilakukan karena dengan keterbatasan nakes yang ada maka perlu adanya perbantuan dari pihak lain terutama TNI agar persoalan penanganan Covid-19 dapat segera teratasi. Adapun pengerahan satuan TNI didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/459/VI/2020 yang menjelaskan TNI memiliki kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 berpedoman pada prinsip kesatuan komando, kecepatan dan ketepatan serta prioritas. Dengan demikian penanganan Covid-19 dapat lebih terencana dan terukur pencapaiannya. Pelibatan TNI dalam konteks ini salah satunya dapat dilihat dari penyebaran Babinsa pada tiap-tiap daerah di Indonesia.

Tabel 4.2: Data Babinsa Februari 2021

NO	SATUAN	BABINSA											
		DSPP		NYATA	KURANG	SUDAH SKEP		BELUM SKEP		OPERASIONAL		DK OPERASIONAL	
		RAMIL A	RAMIL B			RAMIL A	RAMIL B	RAMIL A	RAMIL B	RAMIL A	RAMIL B	RAMIL A	RAMIL B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KODAM IBUKIT	9511		7633	1878	6821		812		7633		0	
		8562	949			6161	660	718	94	6879	754	0	0
2	KODAM II/SRIWIJAY	9575		5924	3651	5718		206		5816		108	
		9357	218			5521	197	203	3	5622	194	102	6
3	KODAM III/SILIWAN	6743		6423	320	6268		155		6423		0	
		6743	0			6268	0	155	0	6423	0	0	0
4	KODAM IV/DIPONE	9674		9405	469	9312		93		9402		3	
		8617	1257			8170	1142	87	6	8323	1079	3	0
5	KODAM V/BRAVIJA	9289		8745	544	8402		343		8699		45	
		9098	191			8277	125	328	15	8559	140	45	0
6	KODAM VI/MULAY	3461		2902	559	2876		26		2900		13	
		1726	1735			1388	1488	0	26	1388	1512	0	13
7	KODAM VII/JUDAYAN	5344		4568	776	4497		71		4568		0	
		2414	2930			2156	2341	28	43	2184	2384	0	0
8	KODAM XII/TANJUN	5919		4957	962	4541		416		4957		0	
		4457	1462			3581	960	264	152	3845	1112	0	0
9	KODAM XIII/MERDE	4594		4053	541	3400		653		3975		78	
		3367	1227			2457	943	513	140	2989	986	22	56
10	KODAM XIV/HASAN	5919		4957	962	4541		416		4957		0	
		4457	1462			3581	960	264	152	3845	1112	0	0
11	KODAM XVI/PATTI	5642		2395	3247	2359		36		2395		0	
		1654	3988			975	1384	8	28	983	1412	0	0
12	KODAM XVIII/CEND	5642		3181	2461	1689		1388		2517		0	
		1654	3988			713	976	275	1113	1033	1484	0	0
13	KODAM XVIII/KASU	2262		1366	896	1252		114		1366		0	
		426	1836			307	945	19	95	326	1040	0	0
14	KODAM ISKANDAR	6507		5175	1332	5217		264		5148		27	
		6141	366			4911	306	245	19	4824	324	26	1
15	KODAM JAYA	2724		2609	115	2492		117		2855		0	
		1080	1644			1004	1488	46	71	1059	1796	0	0
JUMLAH		90282		74293	18713	66893		4993		70756		274	

Sumber: Mabes AD, 2021

Jika melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa penyebaran Babinsa pada tiap-tiap wilayah merupakan bentuk kapabilitas TNI dalam mendukung program pemerintah terkait vaksinasi nasional guna mewujudkan Tannas. Babinsa dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk menjalin hubungan langsung dengan masyarakat. Peran Babinsa menjadi sangat krusial karena mampu lebih memahami persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya berkaitan dengan penanganan Covid-19. Selain itu, keterlibatan TNI menjalankan tugas-tugas operasi penanganan Covid juga ditunjukkan melalui:⁶³

- 1) Membantu pelacakan / Tracing sebagai Tracer-TOT & Pelatihan
- 2) Mendukung PPKM Darurat di desa-Posko, gerakan peduli protokol kesehatan, pembinaan masyarakat, penerapan SOP, sosialisasi, batasan-batasan kegiatan.
- 3) Melakukan karantina wilayah sesuai dengan assesment yang telah dilakukan sebelumnya.
- 4) Distribusi bantuan seperti sembako di wilayah yang melaksanakan pembatasan
- 5) Melakukan pelaporan secara berkala atas kegiatan yang dilakukan.

Selain itu pelibatan TNI dalam vaksinasi juga perlu dilakukan pengawasan agar dapat menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan. Adapun para pejabat yang melakukan pengawasan yaitu:⁶⁴

- 1) Di tingkat Mabes TNI oleh Irjen TNI.
- 2) Di tingkat Mabes Angkatan oleh Irjen Angkatan.
- 3) Di tingkat Kotama oleh Ir Kotama.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan alat kendali berupa pengecekan laporan dan dokumentasi, rapat online / offline, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner dan wawancara, *teleconference*, kunjungan lapangan, serta alat kendali sesuai dengan tingkatan mulai Mabes TNI, Mabes Angkatan, Kotama, Korem dan Kodim yang

⁶³ Paparan Staf Operasi Mabes Tni Dalam Rapat Koordinasi Ops PPKM Mikro di 7 Provinsi, 2021.

⁶⁴ *Ibid.*

dilakukan pada awal, saat berlangsung, dan akhir pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Adapun pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- 1) Di tingkat Mabes TNI oleh Panglima TNI, Asops, Aster Panglima TNI dan Kapuskes TNI.
- 2) Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kas Angkatan, Asops, Aster Kas Angkatan dan Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- 3) Di tingkat Kotama Angkatan oleh Pangdam, Asops dan Aster Kodam, Danrem, Dandim/Dansat serta Kakes Kotama.

Pengendalian dilakukan dengan cara pengecekan secara fisik terhadap program dan anggaran yang sedang berlangsung dan pengecekan peranti lunak antara lain: doktrin, petunjuk penyelenggaraan, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner dan wawancara, *teleconference*, kunjungan kerja Panglima/Staf, Para Dansat dan referensi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam bentuk supervisi dan asistensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun

Secara garis besar, perbantuan TNI sesuai dengan kapabilitas keterlibatannya sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini dapat terlihat dimana TNI sangat konsen untuk mensukseskan program vaksinasi nasional. Keseriusan ini dibuktikan dengan relokasi anggaran kesehatan untuk membantu penanganan Covid-19, penyediaan fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI, penyiapan SDM khususnya dibidang kesehatan agar mampu mempercepat penanganan Covid-19, melakukan distribusi logistik kesehatan yang dibutuhkan serta melakukan pemantauan dan pelacakan dalam yang dibantu pihak-pihak terkait sebagai bentuk pengembangan vaksin. Terkait dengan hal tersebut maka dapat dijelaskan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3: Perbantuan TNI sesuai dengan Kapabilitasnya dalam Penanganan Covid-19

Bidang	Perbantuan oleh TNI sesuai dengan Kapabilitasnya
Relokasi Anggaran Kesehatan	TNI telah melakukan refocusing atau realokasi anggaran sebesar Rp. 196,8 miliar yang berasal dari kebutuhan anggaran Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU untuk membantu penanggulangan COVID-19. Dari total anggaran tersebut, kebutuhan anggaran Mabes TNI sebesar Rp. 25,7 miliar dialokasikan untuk pengadaan alat laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) dan reagen kit khusus virus corona. Kemudian, anggaran TNI AD sebesar Rp. 39,9 miliar digunakan untuk alokasi pengadaan, alat pelindung diri (APD), test kit dan swab dengan keperluan smart helmet. Anggaran TNI AL sebesar Rp. 64,5 miliar dialokasikan untuk peningkatan pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Sedangkan, anggaran TNI AU sebesar Rp. 69,5 miliar dialokasikan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit angkatan udara.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan	TNI berkontribusi dalam membantu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit rujukan khusus COVID-19 diantaranya RSAL Mintoharjo dan RSPAD Gatot Subroto. Saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3,2 triliun bagi pengerahan pasukan TNI untuk percepatan penanganan pandemi corona selama 150 hari. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas 109 fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh ketiga matra di seluruh daerah. Hal ini dilakukan agar fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut dapat dipergunakan untuk penanganan COVID-19 di daerah. ²¹ Selain itu, 68 rumah sakit milik TNI AD juga akan dilengkapi dengan laboratorium yang memiliki alat tes dengan metode PCR yang diharapkan masing-masing rumah sakit dapat memeriksa 10,000 spesimen per hari. ²² TNI juga mendirikan posko siaga, tenda dan ruang isolasi di beberapa daerah, lengkap dengan peralatan medis dan tenaga medis yang disiagakan. Posko dan tenda isolasi tersebut digunakan untuk mempercepat penanganan awal terhadap orang yang yang diduga terinfeksi virus COVID-19 sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan	TNI menyiapkan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, dan tenaga pendukung lainnya untuk merawat pasien COVID-19. Salah satu contohnya adalah dokter militer (dokter umum dan dokter spesialis), perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-medis telah ditempatkan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet untuk menangani pasien yang terinfeksi virus corona. Selain itu, TNI AD juga telah mengerahkan para prajurit Zeni Nubika (Nuklir, Biologi, dan Kimia) untuk melakukan mitigasi, ekstraksi, triase, dan dekontaminasi.
Logistik Kesehatan	TNI juga membantu pemerintah dalam mendistribusikan APD ke berbagai daerah. Pendistribusian APD tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi keterbatasan APD bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. TNI menggunakan transportasi udara seperti pesawat hercules untuk mengangkut dan mendistribusikan APD terutama ke daerah-daerah. Hingga 2 April 2020, tercatat sebanyak 352,450 APD telah didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia .
Pemantauan dan Pelacakan	TNI membantu pemerintah dalam pelacakan intelijen medis seperti pengambilan sampel yang masif, pelacakan (<i>contact tracing & tracking</i>) secara agresif, dan karantina yang ketat untuk menekan penyebaran COVID- 19. ²⁶ Keenam, dari segi <i>research and development</i> (R&D), TNI melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi melakukan penelitian dan pengembangan dalam membuat vaksin, serum atau obat yang dapat menangkai COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Militer

Sumber: Marina, 2020, diolah peneliti, 2021.

TNI pada dasarnya telah memainkan perannya, namun apabila mengacu pada fakta di lapangan dapat diketahui bahwa pelibatan TNI masih menghadapi berbagai persoalan, diantaranya karena kondisi geografi antara satu daerah dengan daerah lainnya yang cukup berbeda. Beberapa daerah

yang dimaksud seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya merupakan wilayah yang memerlukan penanganan khusus, termasuk dengan menggunakan alutsista yang dimiliki TNI. Upaya ini dilakukan agar penanganan Covid-19 dapat lebih optimal sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut TNI, masih menghadapi berbagai masalah diantaranya dalam konteks pelaksanaan kegiatan, bisa dilihat jumlah Babinsa dengan cakupan kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal (penyebaran Babinsa belum maksimal). Sebagai perbandingan, satu Babinsa di daerah luar Jawa memiliki cakupan tugas 3-4 desa. Sedangkan di kota besar khususnya di Jakarta, tiga Babinsa memiliki lingkup tugas 1 desa atau kelurahan. Kondisi semakin kompleks karena Babinsa yang berada di daerah harus mampu menjangkau wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Hal ini tentu sangat mempengaruhi tugas TNI dalam melaksanakan vaksinasi nasional. Selain itu, masih adanya masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait pentingnya vaksinasi menjadi persoalan yang kerap kali dihadapi. Disamping itu juga vaksin yang diberikan dinilai belum teruji karena masyarakat yang sudah divaksin ternyata masih rentan untuk terkena virus Covid-19. Situasi semakin kompleks karena maraknya media sosial yang memberikan informasi kurang akurat terkait vaksinasi sehingga masyarakat enggan untuk menerima vaksin dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada TNI terkait tugas tambahan yang dijalankan berkaitan dengan geografis daerah kepulauan yang sulit dijangkau menjadi sangat mengganggu pelibatan TNI dalam mendukung vaksinasi nasional guna mewujudkan ketahanan nasional.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pelibatan kekuatan yang dilakukan TNI pada dasarnya membutuhkan sinergi antar pihak-pihak terkait. Hal ini perlu dipahami karena sinergi merupakan perpaduan dari berbagai unsur atau elemen yang ada untuk menghasilkan *output* yang lebih baik melalui bekerja secara kelompok.⁶⁵ Penanganan Covid-19 yang cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan pada satu aspek kehidupan maka membutuhkan kerjasama dan sinergi dengan Kepala Daerah, Forkopimda, Ormas, Tokoh Masyarakat, TNI-Polri serta pihak-pihak lainnya. Hal ini perlu

⁶⁵ *Ibid.*

dipahami karena masalah Covid-19 merupakan persoalan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sehingga mampu mencapai tujuan bersama. Sinergi dalam konteks ini lebih dititikberatkan pada terbangunnya kesatuan dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini menjadi perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Terkait dengan persoalan-persoalan tersebut pada dasarnya menuntut TNI untuk mampu mengembangkan kapasitasnya sehingga dapat mendukung program pemerintah khususnya berkenaan dengan mewujudkan ketahanan nasional. Hal ini perlu dipahami karena pembangunan kapasitas dalam konteks ini merupakan bagian dari pelibatan TNI untuk mendukung program pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19.

Meski TNI telah melakukan upaya sebagaimana yang dijelaskan pada tabel di atas, namun hal tersebut belum cukup untuk mendukung pemerintah dalam menangani Covid-19 untuk mewujudkan ketahanan nasional. Maka, menurut analisis penulis berdasarkan teori yang digunakan, dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis seperti:

- 1) TNI perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 perlu segera dilakukan komunikasi publik yang massif, komprehensif strategis termasuk isu halal-haram vaksin. Selain itu contoh keteladanan, misalnya vaksinasi kepada tokoh masyarakat, pejabat negara, dan lain sebagainya.
- 2) Diperlukan upaya meningkatkan pemanfaatan SKA secara optimal sehingga mampu mendorong terwujudnya ketahanan nasional dengan memanfaatkan Babinsa diseluruh wilayah melaksanakan pendampingan kepada Masyarakat di daerah 3T.
- 3) Meningkatkan peran media untuk dapat berkontribusi aktif dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat sehingga dapat mendorong tercapainya vaksinasi nasional.
- 4) TNI perlu meningkatkan perannya dengan cara “jemput bola”, seperti melakukan penjemputan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. Hal ini perlu dipahami karena fokus pelibatan TNI berhubungan dengan pendistribusian dan pelaksanaan vaksin. Untuk itu TNI perlu membangun sinergi yang baik agar proses distribusi dan pelaksanaan vaksin dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

- 5) Pemerintah perlu memperhatikan TNI dengan memberikan insentif maupun sarana prasarana agar para Prajurit dapat lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya pada pelaksanaan serbuan vaksinasi nasional. Terlebih kepada Prajurit yang berada di wilayah terpencil dan terluar yang sangat terbatas dengan sarana transportasi.
- 6) Meningkatkan kemampuan TNI sehingga mampu mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Ini dapat dilakukan melalui membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan instansi di wilayah serta *stakeholder* yang ada sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- 7) TNI-Polri bersama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan PPKM darurat di seluruh wilayah, sampai PPKM skala Desa secara humanis & tegas. Satuan Tugas di tingkat Desa harus bersinergi untuk mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.
- 8) Percepatan pelaksanaan vaksinasi dengan meningkatkan kemampuan personel agar lebih siap dalam mendukung tercapainya program pemerintah tersebut.
- 9) TNI dengan pihak-pihak terkait perlu menggali sumber daya yang ada pada tiap-tiap wilayah sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi. Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam dan Pangan dalam meningkatkan pendapatan Ekonomi dimasa pandemi Covid-19, karena permintaan kebutuhan Pangan cenderung kurang *stabil*.
- 10) Mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi melalui Sinergi antar Forkopimda seperti penggunaan fasilitas TNI-Polri yang meliputi lokasi vaksin, RS TNI-Polri yang tersebar di tanah air, alat transportasi darat, laut & udara dimana kesemuanya sangat membantu khususnya dalam keterlibatan TNI yang berada di daerah pedalaman.
- 11) Membentuk desa-desa tangguh di seluruh wilayah dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang dikoordinasikan oleh para Kepala Desa, para

Babinsa dan Babinkamtibmas serta para tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Penanganan Pandemi Covid-19 pada dasarnya memerlukan upaya-upaya terstruktur, sistematis dan berkelanjutan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program vaksinasi nasional. Dalam mendukung program pemerintah khususnya memerlukan keterlibatan berbagai pihak tak terkecuali TNI. Perlibatan TNI pada konteks ini mengacu pada kekuatan dan kemampuan TNI khususnya dalam melakukan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi. Terkait dengan pelibatan kekuatan TNI pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kendala dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi Nasional. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah personil TNI di daerah, lonjakan kasus terkonfirmasi serta kondisi geografis Indonesia yang cukup kompleks.

Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan vaksinasi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan salah satu bukti bahwa kemampuan TNI belum merata pada tiap-tiap daerah. Selain itu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa TNI tidak hanya dituntut dalam mendukung program vaksinasi. Karakteristik wilayah Indonesia yang kompleks tentu menjadi tantangan dan hambatan tersendiri dalam mendukung program pemerintah tersebut. Terkait dengan pelibatan TNI yang dilaksanakan masih menghadapi berbagai persoalan diantaranya belum merata penyebaran Babinsa pada tiap-tiap daerah dan rendahnya pemahaman masyarakat dalam vaksinasi sehingga berdampak pada belum baiknya pencapaian vaksinasi nasional. Kondisi ini tentu sangat mengganggu pelaksanaan tugas TNI khususnya dalam mendukung vaksinasi nasional.

Berdasarkan, persoalan-persoalan tersebut dapat dirangkum bahwa proses vaksinasi sangat membutuhkan keterlibatan TNI. Hal ini dikarenakan TNI memiliki kesiapsiagaan dalam sumber daya medis dan non-medis, serta sarana dan prasarana yang mendukung penanganan Covid-19. Terlebih lagi terdapat beberapa aspek yang memang khusus membutuhkan satuan TNI

seperti membantu dalam pengamanan hingga distribusi vaksin ke daerah-daerah terpencil. Maka, terkait tantangan dan hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya perlu diatasi dengan memberikan dukungan seoptimal mungkin terhadap TNI, baik dari sisi penguatan koordinasi dengan lembaga terkait hingga alokasi anggaran dalam satuan tugas TNI.

18. Saran

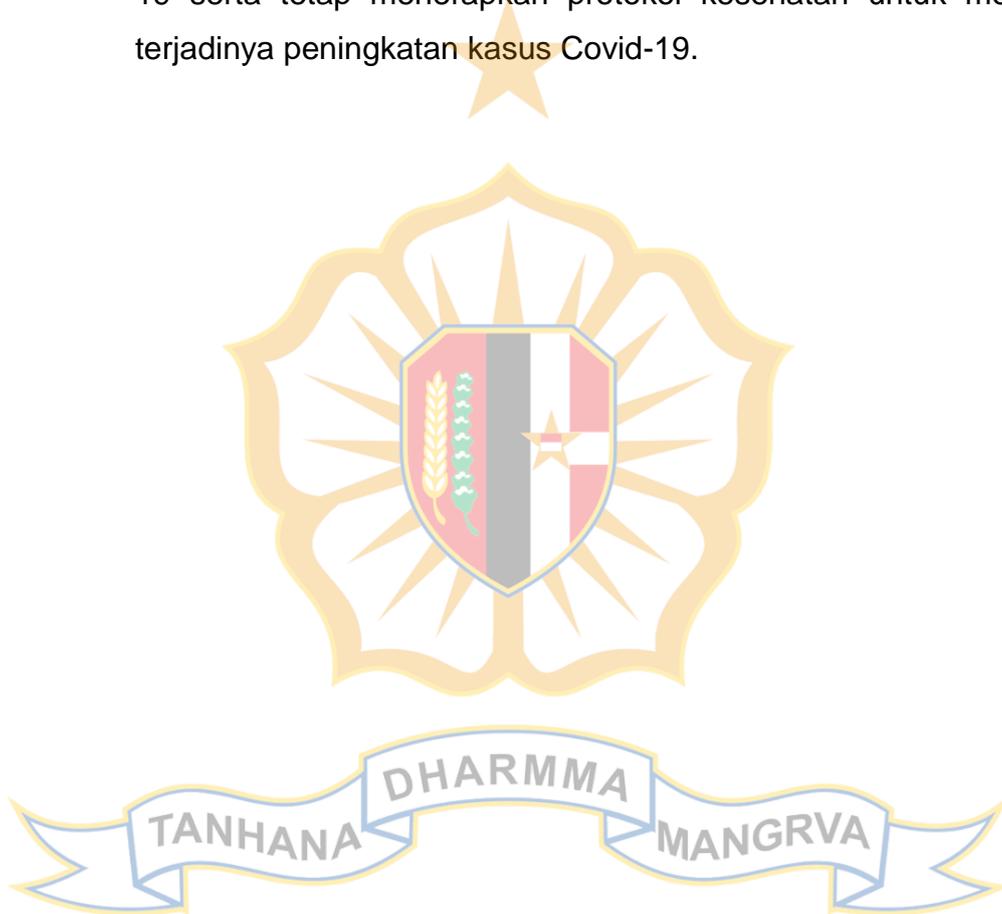
Berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan teori, peraturan perundang-undangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dapat disampaikan beberapa hal khususnya berkenaan dengan optimalisasi pelibatan TNI dalam mendukung program vaksinasi guna mewujudkan ketahanan nasional. Beberapa masukan disusun berdasarkan tingkat kepentingan dan probabilitas yang paling mungkin dilakukan saat ini, sebagai berikut:

- a. TNI perlu meningkatkan edukasi terhadap masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang persuasif khususnya dalam program vaksinasi nasional. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam program tersebut.
- b. Perlu meningkatkan sinergi antar pihak-pihak terkait khususnya berkenaan dengan distribusi dan pelaksanaan vaksin yang melibatkan TNI. Hal ini agar dapat mempercepat pencapaian vaksin yang telah ditetapkan sehingga akan terbangun *herd immunity* yang diharapkan.
- c. Dalam mengatasi masalah kekuatan dan kemampuan TNI maka Pemerintah dan K/L terkait lainnya perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lainnya agar penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi nasional dapat lebih maksimal.
- d. Perlu sinergitas dengan menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi di wilayah serta *stakeholder* yang ada sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam percepatan penanganan Covid-19. Hal ini sebagai bagian memperkuat pelibatan TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya.

- e. TNI perlu membangun jejaring penanganan Covid-19 hingga ke daerah-daerah terpencil. Upaya ini dilakukan dengan membangun komunikasi terintegrasi mulai dari Pemerintah pusat sampai lingkup Rukun Tetangga (RT) sehingga akan terbangun sistem yang kuat dan pelibatan TNI dapat lebih maksimal.
- f. Kemenkes perlu melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan vaksin yang diberikan kepada masyarakat yang disampaikan secara terbuka dan transparan agar terbangun kepercayaan dalam program vaksinasi tersebut.
- g. Kemenkes perlu memberikan pembekalan terhadap anggota TNI agar memiliki kemampuan dasar dalam memberikan vaksin kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat kompleks sehingga tidak mudah terjangkau tenaga medis dalam memberikan vaksin kepada masyarakat. TNI dalam hal ini dapat mengerahkan lulusan personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan dan Satpur sesuai kapasitasnya sehingga mampu mempercepat penanganan Covid-19.
- h. Pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran secara khusus untuk TNI dalam program vaksinasi nasional. Hal ini untuk mendukung pelibatan TNI khususnya di daerah 3T dalam mensukseskan program pemerintah tersebut.
- i. Pemerintah perlu meningkatkan peran Kominfo dalam memberikan edukasi perihal Covid-19 secara akurat dan terpercaya baik di televisi, internet ataupun media sosial sehingga secara tidak langsung akan terbangun pemahaman yang baik bagi masyarakat dalam memahami virus tersebut. Dimana hal ini juga perlu berkerja sama dengan TNI dengan memanfaatkan Satkowil.
- j. TNI perlu melakukan pengkajian kembali perihal penyebaran Babinsa di Indonesia sehingga personel dapat tersebar secara merata dan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas yang dilaksanakan.
- k. Kepala daerah harus tetap konsisten menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Keteladanan yang baik oleh Kepala daerah dalam menerapkan dan menjalankan

protokol kesehatan membuat masyarakat juga akan patuh. Sebaliknya apabila tidak memberikan contoh yang baik, maka akan ada kritik oleh masyarakat dan menyebabkan enggan mematuhi protokol kesehatan.

- I. Forkompimda harus berperan aktif untuk membangun komunikasi, berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, pengelola usaha dan pihak lainnya untuk dapat memiliki kesadaran yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chapman, Richard A., 1997. *The Treasury in Public Policy-Making*, (London and New York: Routledge.
- Covey, Stephen R., 2008. *Kepemimpinan Yang Berprinsip*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Douglas, H., Brown. 2001. *Teaching by Principle: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. New York: Longman.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Bulaksumur. Cetakan ke-5.
- Grindle, M.S., 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1046/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Naskah Sementara Petunjuk Referensi Pedoman Pelaksanaan Vaskinasi Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Jurnal/Artikel

- Albertina, M., S. Febriana, W. Firmanda, Y. Permata, & Gunardi, 2009. Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di Poliklinik Anak Beberapa Rumah Sakit di Jakarta dan Sekitarnya pada Bulan Maret 2008. *Sari Pediatri*, 11(1), pp. 1-7.

Website/Internet

- Ananda Majni, Ferdian dalam
<https://mediaindonesia.com/humaniora/410379/113-juta-penduduk-indonesia-sudah-divaksin-covid-19>, diakses 19 Juni 2021 pukul 23:32 WIB.
- Anggraeni, Rika dalam
<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210113/106/1342384/6-jenis-vaksin-covid-19-di-indonesia-sinovac-astrazeneca-hingga-pfizer>, diakses 1 Juli 2021 pukul 19:05 WIB.
- Anwar, Affendi dan Rustiadi, Ernan. "Masalah Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kebijakan Ekonomi Bagi Pengendalian terhadap Kerusakannya".
<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24803/115-Masalah%20Pengelolaan%20Sumberdaya%20Alam%20dan%20Kebijakan%20Ekonomi%20bagi%20Pengendalian%20terhadap%20Kerusakannya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 30 Mei 2020 pukul 10.43 WIB.
- Budiman, Aditya dalam <https://nasional.tempo.co/read/1495756/data-covid-19-per-17-agustus-2021-mencekam-dibandingkan-tahun-lalu/full&view=ok>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 09:01 WIB.
- Chusna Farisa, Fitria dalam
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=5>, diakses 28 Mei 2021 pukul 08:19 WIB.
- Erika Nugraheny, Dian dalam
<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/19065841/satgas-ketersediaan-terjaga-839-juta-dosis-vaksin-covid-19-diterima>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB.
- Fadhrotul Mukaromah, Vina dalam
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/04/152217865/berikut-cara-indonesia-dan-negara-lain-tangani-virus-corona>, diakses 20 Agustus 2021 pukul 12:00 WIB.
- Fauzia, Mutia dalam
<https://money.kompas.com/read/2020/06/25/054100526/dampak-corona-lebih-parah-imf-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global-4-9-persen>, diakses 21 Juni 2021 pukul 20:00 WIB.

- Guritno, Tatang dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/18060091/update-5034-kasus-baru-covid-19-tersebar-di-30-provinsi-riau-terbanyak?page=2>, diakses 30 Mei 2021 pukul 10:30 WIB.
- Halidi, Risna dalam <https://www.suara.com/health/2020/03/17/210741/ini-alasan-mengapa-wabah-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional>, diakses 25 Juni 2021 pukul 19:01 WIB.
- <https://economy.okezone.com/read/2021/05/27/320/2416076/data-terbaru-jumlah-pengangguran-ri-ada-8-75-juta-orang>, diakses 1 Juni 2021 pukul 11:00 WIB.
- <https://id.berita.yahoo.com/memperingatkan-bahwa-pandemi-corona-dapat-123035424.html>, diakses 20 Mei 2021 pukul 16.23 WIB.
- <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbang-baru-di-kalimantan-tengah>, diakses 22 Juni 2021 pukul 16:30 WIB.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20210211/15/1355207/jokowi-perintahkan-vaksinasi-Covid-19-dilaksanakan-secara-klaster> dan <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemerintah-targetkan-vaksinasi-nasional-rampung-akhir-tahun/ar-BB1eoz2z> diakses 11 Februari 2021 pukul 13.21 WIB.
- <https://koran.tempo.co/read/ragam/465986/pemerintah-mengejar-target-vaksinasi-1815-juta-jiwa-sampai-akhir-2021-untuk-mengejar-kekebalan-komunal?>, diakses 1 Juli 2021 pukul 17:05 WIB.
- <https://kumparan.com/kumparannews/kendala-produksi-vaksin-butuh-246-juta-bio-farma-hanya-mampu-30-juta-setahun-1ukkX5RL1rW/3>, diakses 17 Agustus 2021 pukul 18:31 WIB.
- <https://medan.tribunnews.com/2021/08/21/apa-itu-vaksin-sinovac-dan-astrazeneca-ketahui-gejala-yang-muncul-dan-efek-sampingnya>, diakses 18 Agustus 2021, pukul 15:31 WIB.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/413616/percepatan-vaksinasi-covid-19-sebanyak-1-juta-perhari-mulai-juli-2021>, diakses 2 Juli 2021 pukul 21:12 WIB.

<https://nasional.okezone.com/read/2021/08/05/337/2451568/21-juta-penduduk-indonesia-sudah-divaksin-covid-19-secara-lengkap>, diakses 17 Agustus 2021 pukul 17:12 WIB.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses 21 Juni 2021 pukul 22:00 WIB.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132255604/dampak-pandemi-covid-19-hantam-sistem-layanan-kesehatan-dalam-4-gelombang?page=3>, diakses 19 Agustus 2021 pukul 15:32 WIB.

<https://waspada.co.id/2021/06/update-covid-nasional-24-juni-angka-positif-bertambah-20-574-kasus-aktif-naik-jadi-171-542-orang/>, diakses 25 Juni 2021 pukul 11:21 WIB.

<https://www.astroawani.com/berita-dunia/covid19-ketahui-bagaimana-negara-lain-menangani-wabak-ini-235221>, diakses 19 Agustus 2021 pukul 13:31 WIB.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-jumat-9-juli/1>, diakses 10 Juli 2021 pukul 22:51 WIB.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-20-agustus/1>, diakses 21 Agustus 2021 pukul 11:00 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/04/152217865/berikut-cara-indonesia-dan-negara-lain-tangani-virus-corona?page=3>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 17:38 WIB.

<https://www.liputan6.com/global/read/4634010/17-agustus-2078-juta-kasus-covid-19-di-dunia-47-juta-dosis-vaksin-disalurkan>, diakses 18 Agustus 2021, pukul 18:13 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4237990/peneliti-krisis-pangan-dampak-pandemi-corona-covid-19-harus-diwaspadai>, diakses 31 Mei 2021 pukul 11:21 WIB.

<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/kspi-perkiraan-2021-bakal-terjadi-ledakan-phk-di-mana-mana/ar-BB1chyu1>, diakses 23 Juni 2021 pukul 19:21 WIB.

<https://www.republika.id/posts/17850/lindungi-anak-anak>, diakses 24 Juni 2021 pukul 21:41 WIB.

<https://www.solopos.com/who-prediksi-jumlah-kasus-covid-19-di-dunia-bisa-capai-300-juta-di-awal-2022-1147175>, diakses 21 Agustus 2021 pukul 14:00 WIB.

<https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>, diakses 19 Juni 2021 pukul 11:21 WIB.

Ihsanuddin dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggungan-cicilan?page=3>, diakses 19 Juni 2021 pukul 15:21 WIB.

Ihsanuddin dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggungan-cicilan?page=3>, diakses 28 Mei 2021 pukul 08:12 WIB.

Kartika Dewi, Retia dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/09/200200965/4-tahapan-vaksinasi-covid-19-dan-jadwal-pelaksanaannya>, diakses 1 Juli 2021 pukul 21:00 WIB.

Lestari, Reni dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20200720/19/1268360/fao-27-negara-dibayangi-krisis-pangan-gara-gara-pandemi-covid-19>, diakses 19 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

Mulyana, Cahya dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/329022/pandemi-covid-19-juga-berdampak-ke-pertahanan-dan-keamanan>, diakses 1 Juni 2021 pukul 11:50 WIB.

Nurul Ulya, Fika dalam <https://money.kompas.com/read/2020/08/13/133706626/ini-10-negara-jatuh-resesi-akibat-pandemi-bagaimana-dengan-indonesia>, diakses 21 Juni 2021 pukul 20:00 WIB.

Puspa, Atalya dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/418535/penambahan-kasus-covid-19-harian-indonesia-tembus-50-ribu-kasus>, diakses 18 Agustus 2021 pukul 21:31 WIB.

Rachman, Yudi dalam <https://www.law-justice.co/artikel/108325/menlu--waspada-kasus-covid-19-di-asia-tenggara-naik-19-persen/>, diakses 1 Juni 2021 pukul 13:31 WIB.

Ramadhan, Ardito dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/17333731/rumah-sakit-makin-penuh-satgas-dorong-redistribusi-pasien-covid-19>, diakses 7 Juli 2021 pukul 21:21 WIB.

Wulan Nugrahani, Andari dalam <https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/24/update-corona-global-23-juni-2021-siang-jumlah-infeksi-covid-di-seluruh-dunia-lampau-1803-juta>, diakses 24 Juni 2021 pukul 22:32 WIB.

Zuraya, Nidia dalam <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>, diakses 14 April 2021 pukul 10.44 WIB.

Lain-lain

Dannyanti, Sudaryantho Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana UNDIP), Disertasi, Universitas Diponegoro.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Paparan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Strategi Memperkuat Ketahanan Kesehatan Nasional, Maret.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2021. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

Lembaga Ketahanan Nasional. 2021. Paparan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LXII. Jakarta: Lemhanas RI.

Our World in Data with latest available data on 2nd July dalam paparan Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Eksekutif Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) tentang Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021.

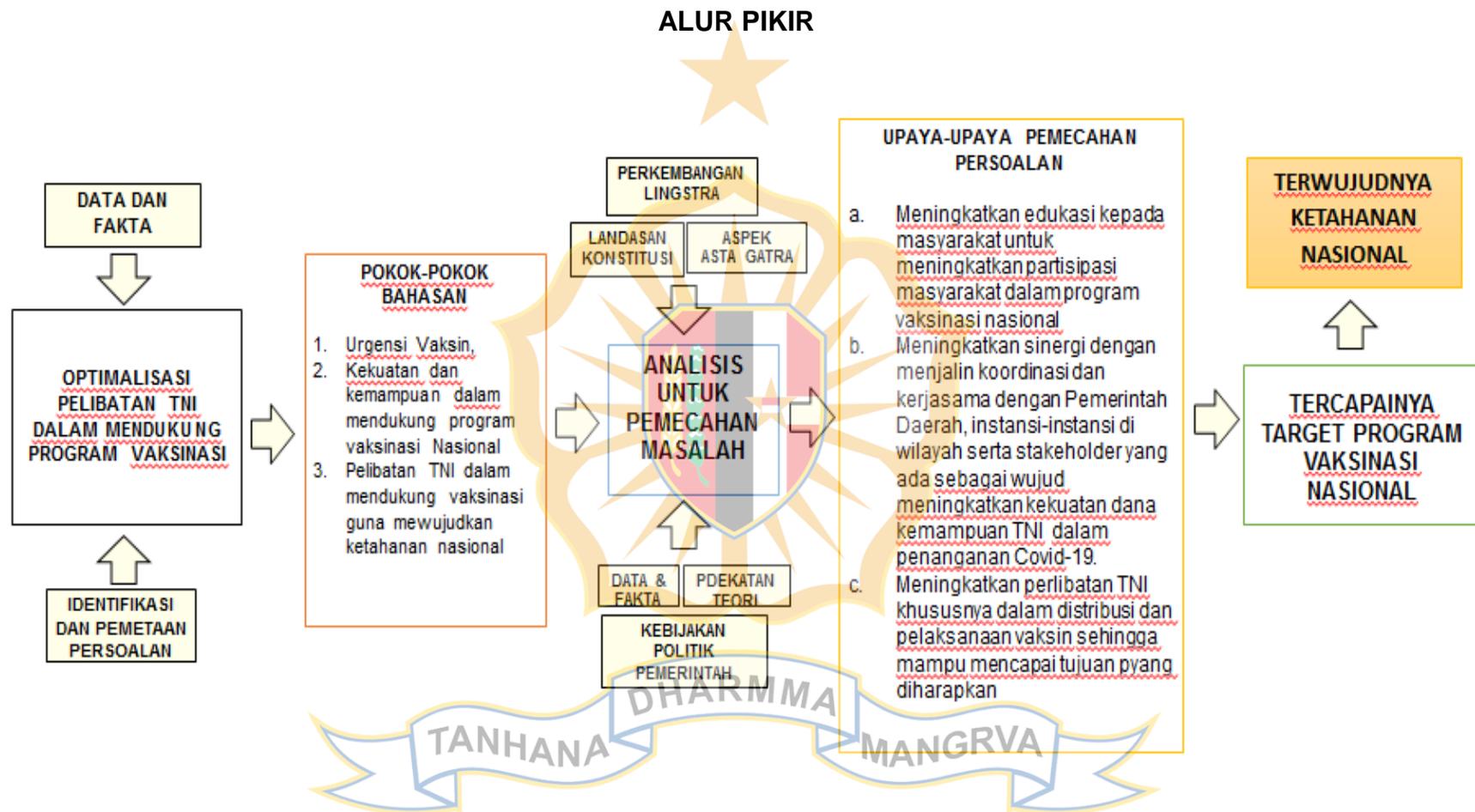
Paparan Asrenum Panglima TNI. 2021. Kebijakan Strategi Penggunaan/Pengerahan Kekuatan TNI. Jakarta.

Paparan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi tentang Rengiat dan Evaluasi Serbuan Vaksinasi.

Paparan Staf Operasi Mabes TNI Dalam Rapat Koordinasi Ops PPKM Mikro di 7 Provinsi, 2021.



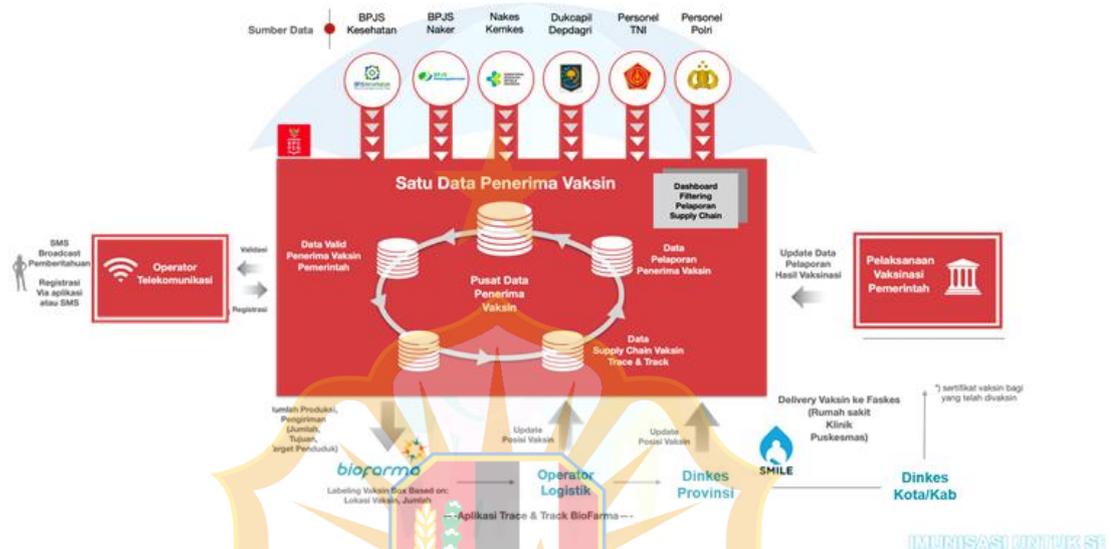
Lampiran 1:



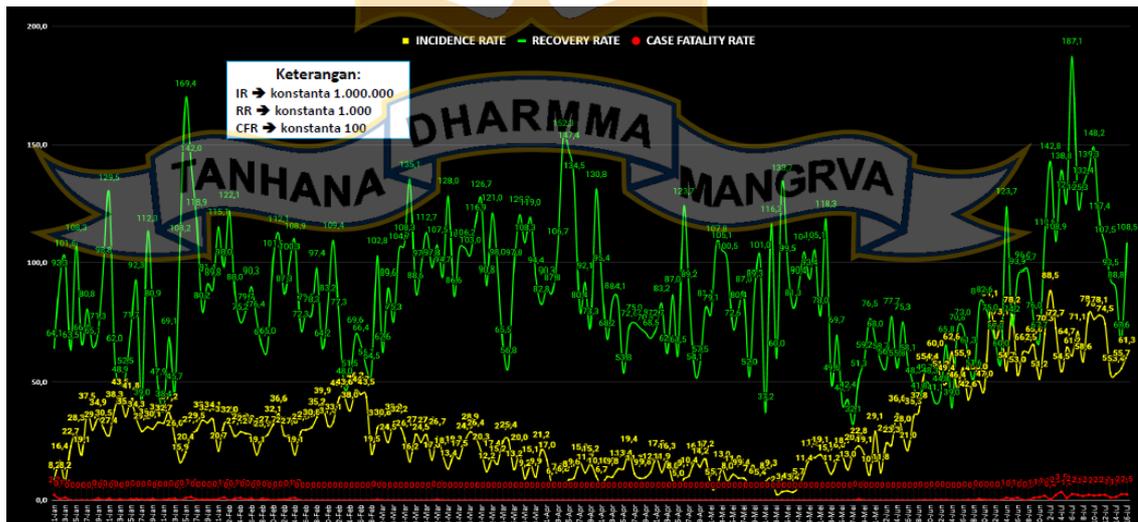
Lampiran 2:

KELENGKAPAN DATA

Gambar: Sistem Informasi Terintegrasi Mendukung Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19



Gambar: Perkembangan Kasus Harian Covid-19 RSDCWAK dan Rusun Nagrak Tahun 2021



Gambar : Pembentukan Kelembagaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Perpres No. 82 Tahun 2020 Ditetapkan Pada 20 Juli 2020

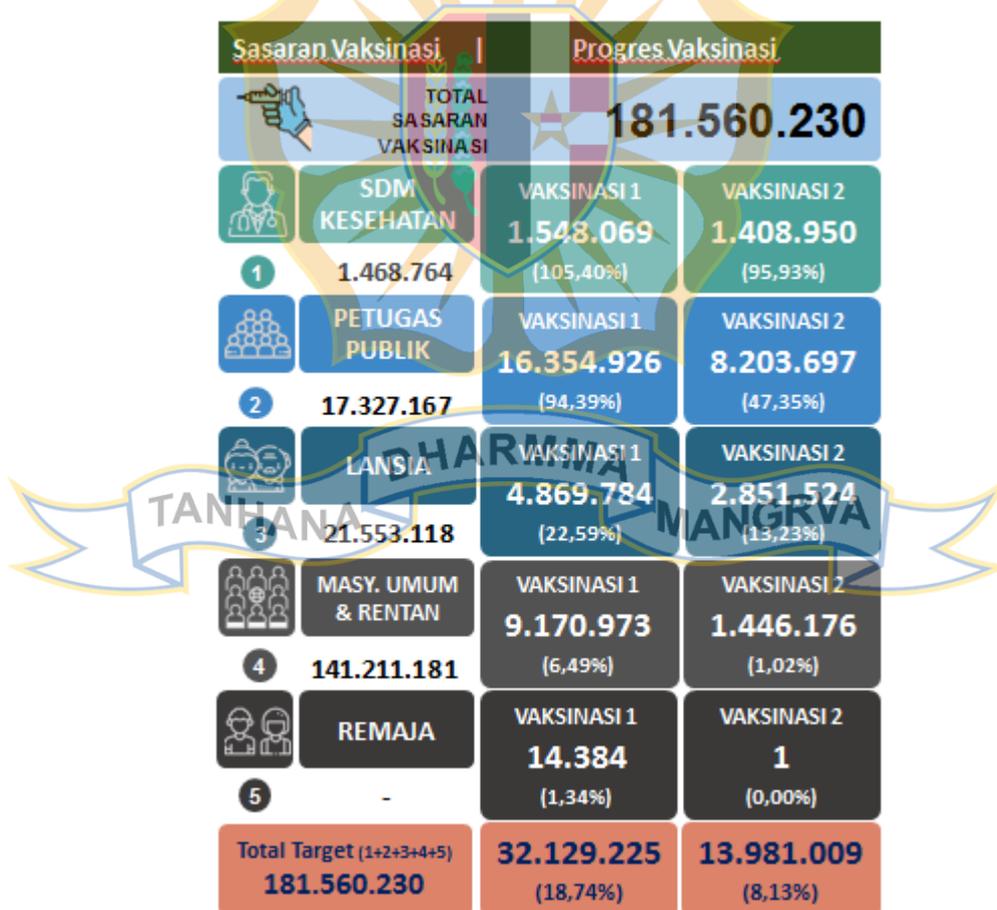
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Serta Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Dibentuk Komite.



"MENDAGRI sebagai Wakil Ketua VI"

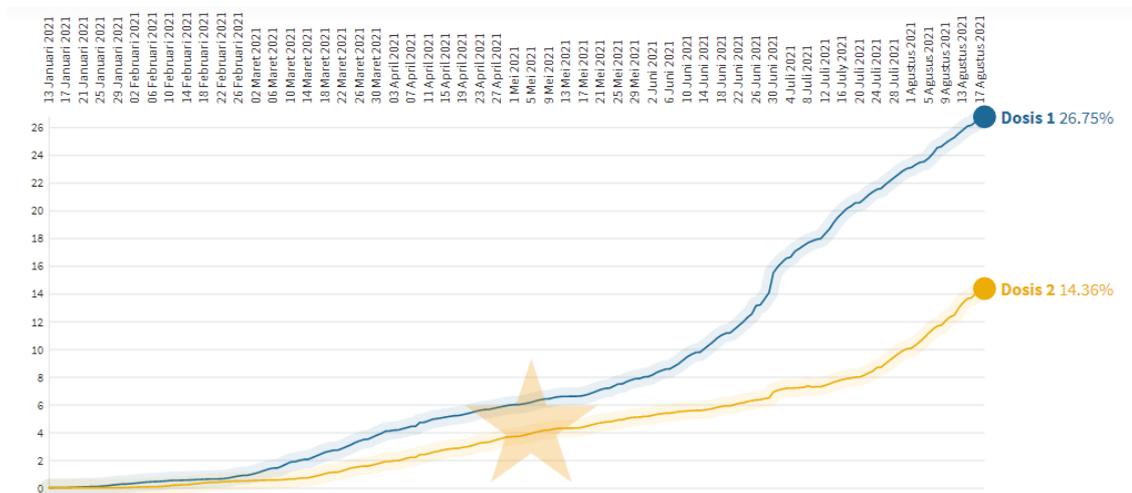
Sumber: Kemendagri, 2021

Gambar : Perkembangan Vaksinasi di Indonesia per 4 Juli 2021



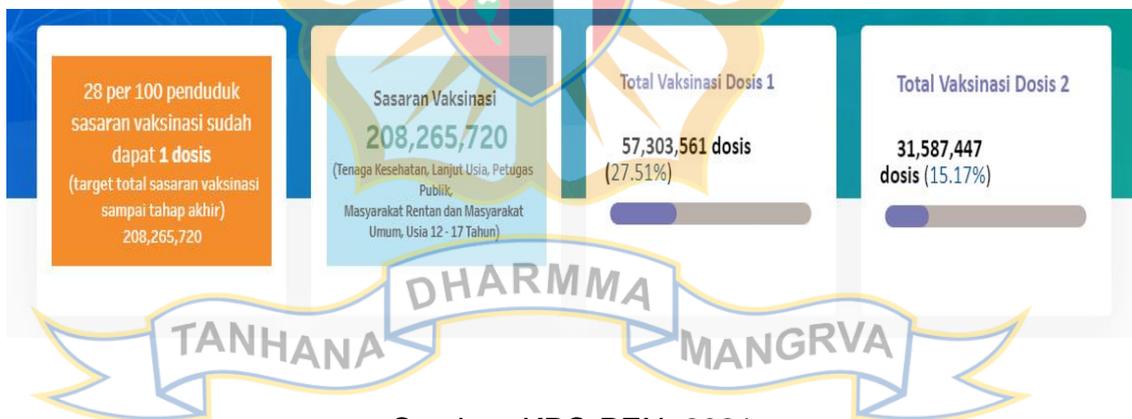
Sumber: KPC-PEN, 2021

Gambar: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 dan 2 di Indonesia per 17 Agustus 2021



Sumber: KPC-PEN, 2021

Gambar: Vaksinasi Covid-19 per 21 Agustus 2021



Sumber: KPC-PEN, 2021

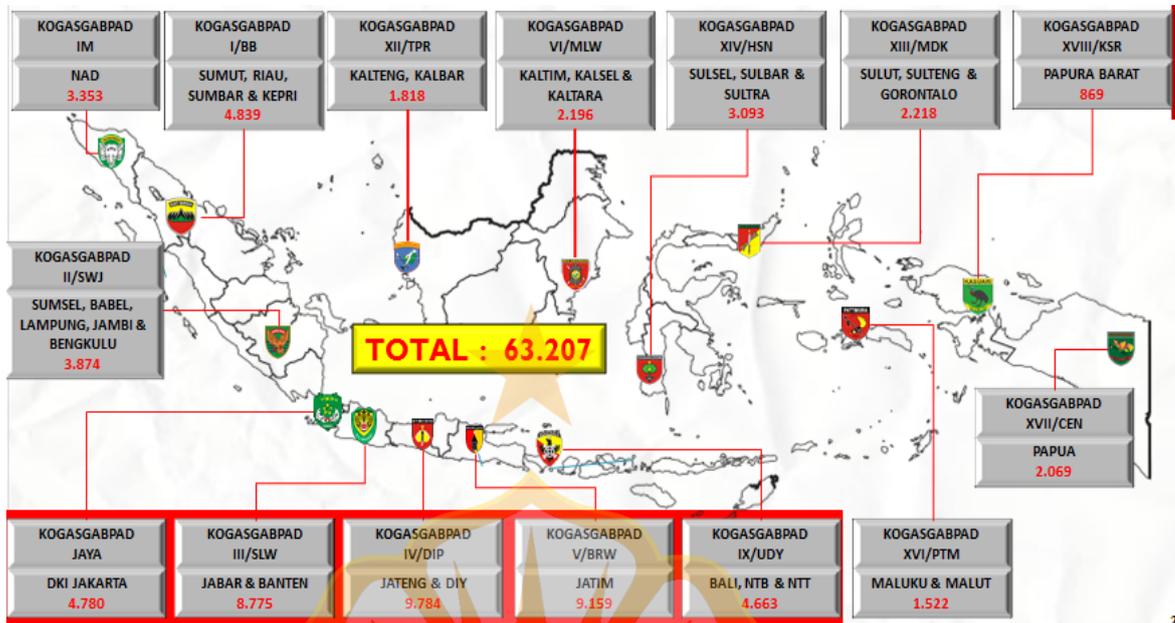
Gambar: Perkembangan Vaksin Covid-19 di Indonesia



Olah visual: 160721/KPC

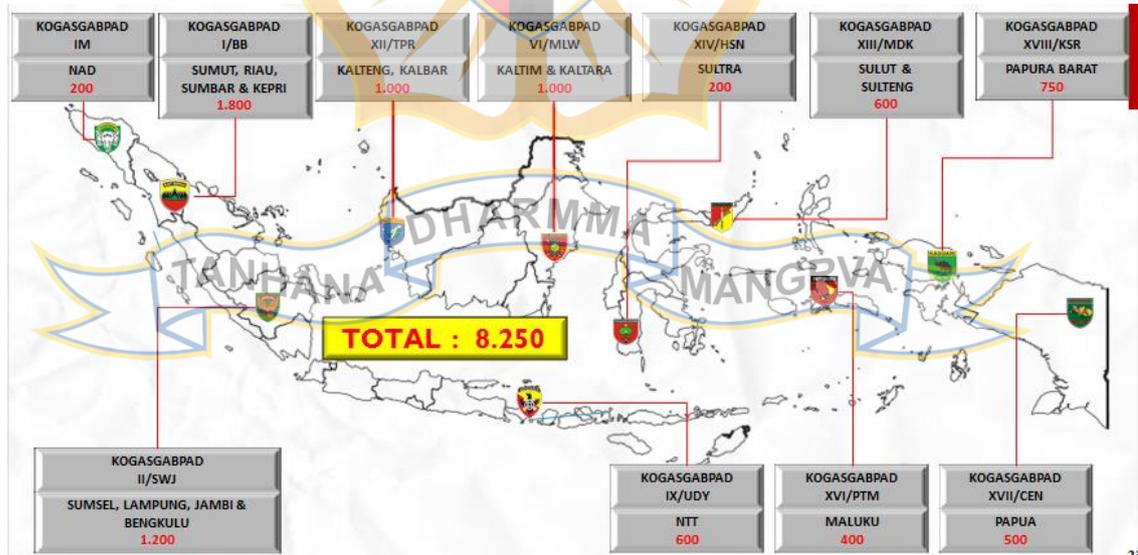
Sumber: Kemenkes, 2021

Gambar: Kekuatan TNI Operasi Penanganan Covid-19, PPKM Mikro Di 34 Provinsi dan PPKM Darurat Wilayah Jawa Bali Mulai tanggal 3 Juli s/d 20 Juli 2021



Sumber: MABES TNI, 2021

Gambar: Kekuatan TNI Dalam Rangka Penebalan di 43 Kab/Kota Zona Merah di Luar Jawa Bali Mulai Tgl 8 Juli s/d 22 Juli 2021

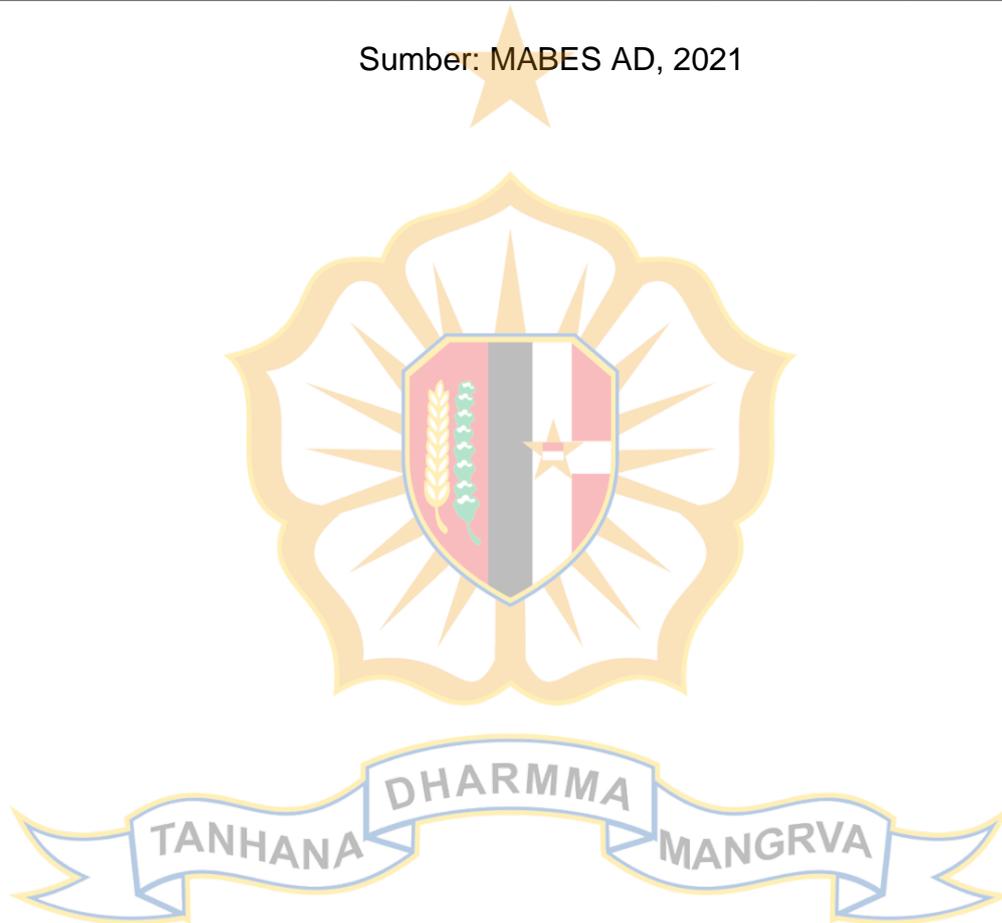


Sumber: MABES TNI, 2021

Tabel: Pengerahan Kekuatan TNI Pada PPKM Mikro Di 7 Provinsi

NO	KOTAMA OPS	KOGAB	MAKODAM	KOREM	KODIM	BABINSA	TNI AL	TNI AU	JUMLAH PERS
1.	Kodam III/Slw (Prov Jabar & Banten)		50	100	360	6.444	50	236	7.240
2.	Kodam IV/Dip (Prov Jateng & DIY)		50	100	540	9.371	100	75	10.236
3.	Kodam V/Brw (Prov Jatim)		50	100	495	8.604	270	150	9.669
4.	Kodam IX/udy (Prov Bali)		50	25	120	770	75	50	1.090
5.	Kodam Jaya (Prov DKI)		50	50	150	2.565	400	150	3.365
6.	Kogabwilhan I	25							25
7.	Kogabwilhan II	25							25
JUMLAH		50	250	375	1.665	27.754	895	661	31.650

Sumber: MABES AD, 2021



Lampiran 3:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : Endro Satoto, S.I.P., M.M., M.Han
2. PANGKAT/KORPS : Kolonel Infanteri
3. NRP : 1910036310669
4. JABATAN : Pamen Mabasad
5. TEMPAT TGL LAHIR : Pati, 3 Juni 1969
6. RIWAYAT JABATAN :



NO	JABATAN	TMT
1	PAMA PUSSENIF	27-07-1991
2	DANTON MORTIR 81 YONIF L 330/K	04-05-1992
3	DANTON III KI C YONIF L 328/K	01-04-1993
4	DANTON II KI A YONIF L 328/K	01-02-1996
5	PASI-1/INTEL YONIF L 328/K	01-02-1997
6	DANKIMA YONIF L 328/K	01-12-1997
7	DANKIBAN YONIF L 328/K	01-02-2000
8	KASIBEK SLOG DIVIF 1/K	22-09-2001
9	KASI-4/LOG BRIGIF LINUD 17/K	01-09-2002
10	PABANDYA MINTER KOSTRAD	18-11-2006
11	DAN YONIF L 305 KOSTRAD	15-02-2007
12	KASPRI PANGKOSTRAD	22-11-2007
13	PABANDYA OPS SOPSDAM III/SLW	20-05-2010
14	DANDIM 0605/SBG REM 063/SGJ DAM III/SLW	30-03-2011
15	DANDIM 0607/SMI REM 061 SK DAM III/SLW	11-08-2011
16	WAASOPS KASDAM III/SLW	25-01-2012
17	DANBRIG 20/IMA JAYA KERAMO	21-08-2014
18	PAMEN DENMA MABESAD (DIK SESKO TNI)	28-03-2016
19	KASREM 131/SANTIAGO	20-04-2017
20	DANREM 152/BABULLAH	17-04-2018
21	PABAN II/MINIOPS SOSPAD	08-06-2020